



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 32 TAHUN  
2022 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah muatan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 42);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kabupaten Purbalingga dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE Kabupaten Purbalingga.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE;
  - g. audit Teknologi SPBE; dan
  - h. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
  - a. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. perubahan rencana Strategis Kabupaten Purbalingga; dan
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga.
- (5) Review Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim koordinasi SPBE.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  1. Bab I : PENDAHULUAN
  2. Bab II : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN SPBE
  3. Bab III : ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE KABUPATEN PURBALINGGA
  4. Bab IV : EVALUASI DAN PENILAIAN SPBE
  5. Bab V : KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN PURBALINGGA
  6. Bab VI : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
  7. Bab VII : TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN PURBALINGGA
  8. Bab VIII : ANALISIS KESENJANGAN
  9. Bab IX : PETA RENCANA SPBE KABUPATEN PURBALINGGA
  10. Bab X : DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI
  11. Bab XI : PENUTUP
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Oktober 2024  
Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

Ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022-2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *E-Government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government (integrated Government)*. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi, dimana integrasi dimulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, dimana peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
  15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
  16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  17. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  18. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga adalah untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE *Framework*);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE *Roadmap*);
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE *Implementation Plan*).

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Purbalingga yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Purbalingga;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Purbalingga;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

### **1.4. Ruang Lingkup**

#### **1.4.1. BAB I: PENDAHULUAN**

#### **1.4.2. BAB II : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN SPBE**

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

#### **1.4.3. BAB III : ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE**

## KABUPATEN PURBALINGGA

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan & strategi SPBE Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE

### 1.4.4. BAB IV: EVALUASI DAN PENILAIAN SPBE

Bab ini memberikan penjelasan evaluasi dan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai ketentuan Permen PANRB no 29 Tahun 2020 tentang penilaian dan evaluasi SPBE.

### 1.4.4. BAB V : KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN PURBALINGGA

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE Kabupaten Purbalingga sesuai hasil evaluasi SPBE Tahun 2021

### 1.4.5. BAB VI : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan menengah Kabupaten Purbalingga.

### 1.4.6. BAB VII : TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN PURBALINGGA

Bab ini memberikan penjelasan tentang target index SPBE dan target kuantitatif yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga

### 1.4.7. BAB VIII : ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga.

### 1.4.8. BAB IX : PETA RENCANA SPBE KABUPATEN PURBALINGGA

Bab ini memberikan penjelasan tentang rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Purbalingga dari Tahun 2022 - 2026

### 1.4.9. BAB X : DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan penjelasan tentang inisiatif program untuk implementasi SPBE di Kabupaten Purbalingga

### 1.4.10. BAB XI : PENUTUP

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### **2.1. Visi SPBE**

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menghasilkan Birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Purbalingga selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

***“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai Birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”***

#### **2.2. Misi SPBE**

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Purbalingga dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### **2.3. Tujuan SPBE**

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

### **2.4. Sasaran SPBE**

Berdasarkan visi dan misi SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi;
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

### **BAB III**

## **ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE KABUPATEN PURBALINGGA**

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE meliputi :

1. Kebijakan SPBE
2. Tata Kelola SPBE
3. Manajemen SPBE
4. Layanan SPBE

#### **3.1. Kebijakan SPBE**

Dasar arah kebijakan strategi SPBE Kabupaten Purbalingga adalah mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE yang semua tertera dalam Perpres No. 95 tahun 2018, ditambahkan dengan langkah percepatan transformasi digital dari Presiden Joko Widodo serta RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021-2026 yang di dalamnya terdapat arah strategi jangka panjang dan jangka menengah. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
2. Melakukan harmonisasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE;
3. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

### **3.2. Tata Kelola SPBE**

Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu, yang terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek Perencanaan Strategis SPBE, ASPEK Teknologi Informasi & Aspek Penyelenggaraan SPBE.

#### **3.2.1. Aspek Perencanaan Strategis SPBE**

Aspek perencanaan SPBE terdiri Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan rencana dan anggaran SPBE serta invasi proses bisnis SPBE. Pembuatan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE terdiri dari :

- a. Arsitektur Proses bisnis
- b. Arsitektur Layanan
- c. Arsitektur Data
- d. Arsitektur Aplikasi
- e. Arsitektur Infrastruktur
- f. Arsitektur Keamanan

#### **3.2.2. Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup :
  - a. Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
  - b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara :
    - b.1. Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang

- meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah.
- b.2. Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
  - b.3. Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE, dan Menjangkau semua instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
2. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
- a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
  - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan untuk menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
  - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
    - 1) Menerapkan manajemen data yang terpadu;
    - 2) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
    - 3) Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

### **3.2.3. Aspek Penyelenggaraan SPBE**

Penyelenggaraan SPBE terdiri dari tim koordinasi SPBE & tim kapasitas pengelolaan SPBE. Tim koordinasi pemerintah daerah adalah pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya merumuskan kebijakan dan penetapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Tim koordinasi SPBE dapat disejajarkan dengan tim pengarah TIK, Komite Pengarah TIK. Tim Koordinasi SPBE pemerintah daerah dipimpin oleh seorang koordinator ditetapkan oleh pimpinan daerah. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga.

Masing-masing OPD di Kabupaten Purbalingga perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan tim koordinasi untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga adalah :

- a) Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
- b) Membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan
- c) Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

### **3.3. Manajemen SPBE**

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen berarti ketersediaan panduan atau pedoman

pelaksanaan dan entitas yang melaksanakannya. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap manajemen SPBE, dan langkah pertama yang harus ada adalah tersedianya panduan atau pedoman sebagai berikut :

- a. Manajemen Resiko
- b. Manajemen Data
- c. Manajemen Keamanan Informasi
- d. Manajemen Aset TIK
- e. Manajemen SDM
- f. Manajemen Pengetahuan
- g. Manajemen Perubahan
- h. Manajemen Layanan

### **3.4. Layanan SPBE**

Keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan ini adalah suatu rangkaian proses bisnis yang terintegrasi dan memiliki *single entry*. Untuk memudahkan mengaksesnya dapat diletakkan dalam sebuah Portal Layanan Terpadu. Terdapat 2 pengelompokan layanan :

1. Layanan Administrasi Pemerintahan
  - a. Layanan Perencanaan
  - b. Layanan Penganggaran
  - c. Layanan Keuangan
  - d. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
  - e. Layanan Kepegawaian
  - f. Layanan Pengarsipan
  - g. Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - h. Layanan Pengawasan Pemerintah
  - i. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - j. Layanan Kinerja Pegawai
  
2. Layanan Publik / Tematik
  - a. Layanan Pengaduan

- b. Layanan Open Data
- c. Layanan JDIH
- d. Layanan Kesehatan
- e. Layanan Rumah Sakit
- f. Layanan Administrasi Kependudukan
- g. Layanan Perizinan
- h. Layanan Pariwisata
- i. Layanan UMKM dan Perdagangan
- j. Layanan Kebencanaan
- k. Layanan Ketenagakerjaan
- l. Layanan Perumahan dan Pemukiman
- m. Layanan Perhubungan dan Transportasi
- n. Layanan Sektor Pangan dan Perikanan
- o. Layanan Sektor Kesejahteraan Sosial

## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN PENILAIAN SPBE**

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2019**

<b>Domain dan Aspek Penilaian</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Total Bobot</b>
<b>Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE</b>	<b>17</b>	<b>17%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
<b>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</b>	<b>7</b>	<b>28%</b>
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
<b>Domain dan Aspek Penilaian</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Total Bobot</b>
<b>Domain 3 – Layanan SPBE</b>	<b>11</b>	<b>55%</b>
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Sedangkan bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2021**

<b>Domain dan Aspek Penilaian</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Total Bobot</b>
<b>Domain 1 – Kebijakan Internal Terkait SPBE</b>	<b>10</b>	<b>13%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE		13%
<b>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</b>	<b>10</b>	<b>25 %</b>
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE		10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan komunikasi		10%
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE		5%
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>11</b>	<b>16,5%</b>
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%

Aspek 6 - Audit TIK		4,5%
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>16</b>	<b>45,5%</b>
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik		18%

**Tabel 3. Perbedaan komposisi bobot perhitungan Indek SPBE dalam Permen PAN RB 8 tahun 2018 dengan Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.**

Domain dan Aspek Penilaian	Instrumen Sebelumnya		Instrumen Baru	
	Jumlah Indikator (35)	Bobot (100%)	Jumlah Indikator (47)	Bobot (100%)
<b>Domain 1 - Kebijakan Internal Terkait SPBE</b>	17	17%	<b>10</b>	<b>13%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE				13%
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	7	28%	<b>10</b>	%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE				10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi				10%
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE				5%
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	-	-	<b>11</b>	<b>16,5%</b>
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE				12%
Aspek 6 - Audit TIK				4,5%
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	11	55%	<b>16</b>	<b>45,5%</b>
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				27,5%
Aspek 8 - Layanan Pengaduan Pelayanan Publik				18%

**Tabel 4. Perbedaan Indikator indik SPBE dalam Permen PANRB 8 tahun 2018 dengan Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Domain 2	<b>Tata Kelola SPBE</b>	
Aspek 2	<b>Perencanaan Strategis SPBE</b>	X
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE

Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
Indikator 13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 3	<b>Teknologi Informasi dan komunikasi</b>	
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Aspek 4	<b>Penyelenggara SPBE</b>	
Indikator 19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Tim Pengarah SPBE
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	X

**Tabel 5. Bobot Aspek SPBE sesuai Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13,00
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00
	Total Bobot	100,00

**Tabel 6. Bobot Indikator Indek SPBE sesuai Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1,30
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1,30
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,30
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1,30
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1,30
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2,50

Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,50
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,50
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,50
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,50
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,50
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3,00
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3,00
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,00
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3,00
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3,00
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3,00
	Total Bobot	100,00

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

**Tabel 7. Kategori Nilai Indeks SPBE**

<b>NO</b>	<b>Nilai Indeks</b>	<b>Kategori</b>
<b>1</b>	4,2 – 5,0	Memuaskan
<b>2</b>	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
<b>3</b>	2,6 - < 3,5	Baik
<b>4</b>	1,8 - < 2,6	Cukup
<b>5</b>	< 1,8	Kurang

## **KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN SPBE**

### **1. Kapabilitas Proses Pengukuran**

Kapabilitas proses mencakup pengukuran tingkat kematangan pada kebijakan SPBE, proses tata kelola SPBE, dan proses manajemen SPBE. Adapun penjelasan rinci kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Tingkat Rintisan**

- 1) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE belum tersedia atau masih dalam bentuk konsep/rancangan kebijakan.
- 2) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, dan bersifat reaktif atas inisiatif pimpinan di dalam penerapan SPBE sehingga mengakibatkan pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan. Selain itu, proses tata kelola dan manajemen SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdokumentasi, tidak terorganisasi dengan baik, dan tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi.

## **B. Tingkat Terkelola**

- 1) Kriteria Tingkat Rintisan telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah dilegalisasi, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial atau sektoral sehingga belum mampu mendorong keterpaduan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, setiap unit kerja/perangkat daerah melaksanakan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan fungsi manajemen masing-masing, tanpa panduan/pedoman yang baku.

## **C. Tingkat Terdefinisi**

- 1) Kriteria Tingkat Terkelola telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah mengatur ruang lingkup substansi yang lengkap dan menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi semua unit kerja/perangkat daerah, namun belum mengatur keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) oleh semua unit kerja/perangkat daerah dengan mengacu pada pedoman yang baku. Namun, keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah belum diarahkan dan dikendalikan dalam pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE sehingga kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah untuk penerapan SPBE yang terpadu belum dapat dilaksanakan.

## **D. Tingkat Terpadu dan Terukur**

- 1) Kriteria Tingkat Terdefinisi telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah mengatur keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah untuk mencapai tujuan penerapan tata kelola dan manajemen SPBE, serta dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, teknologi, dan lingkungan internal atau eksternal organisasi.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua unit kerja/perangkat daerah terkait untuk mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu. Penerapan tata kelola dan manajemen SPBE telah menghasilkan kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif melalui kegiatan reviu dan evaluasi secara berkala.

#### **E. Tingkat Optimum**

- 1) Kriteria Tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah dilakukan revisi atau penggantian kebijakan baru sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal serta mengatur mekanisme pengelolaan perubahan tersebut.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi. Dampak perubahan dari perbaikan atau peningkatan kualitas proses tata kelola dan manajemen SPBE dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen perubahan.

#### **2. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan**

Pengukuran kapabilitas layanan mencakup pengukuran tingkat kematangan pada layanan administrasi pemerintahan berbasis

elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Tingkat Informasi** Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah hanya mampu memberikan layanan berupa informasi satu arah kepada pengguna SPBE seperti diseminasi informasi terkait dengan layanan, tautan, atau referensi informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

## **2. Tingkat Interaksi**

- a. Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi.
- b. Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE.

## **3. Tingkat Transaksi**

- a. Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi.
- b. Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas transaksi kepada pengguna SPBE, yaitu beberapa operasi layanan yang menggunakan berbagai sumber daya SPBE dilaksanakan dalam satu transaksi. Sistem elektronik/sistem aplikasi mampu melakukan serangkaian proses kerja secara otomatis (*automatic workflow*) berupa serangkaian komputasi, analitik, validasi, persetujuan, pembayaran finansial, dan notifikasi yang menghasilkan layanan kepada pengguna dalam satu transaksi.

## **4. Tingkat Kolaborasi**

- a. Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi.
- b. Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas kolaborasi atau integrasi

antar layanan SPBE. Kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara horizontal, yaitu layanan SPBE yang berbeda dan dihasilkan dari sistem elektronik/sistem aplikasi yang berbeda dapat dikolaborasikan atau diintegrasikan menjadi satu kesatuan alur kerja seperti layanan kepegawaian yang dikolaborasikan dengan layanan keuangan. Selain itu, kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara vertikal, yaitu layanan SPBE yang sama dan dihasilkan dari sistem elektronik/sistem aplikasi yang berbeda dapat dikolaborasikan atau diintegrasikan secara berjenjang menjadi satu kesatuan layanan, seperti layanan informasi pengadaan secara elektronik yang ada di masing-masing Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat diagregasi menjadi satu layanan.

## **5. Tingkat Optimum**

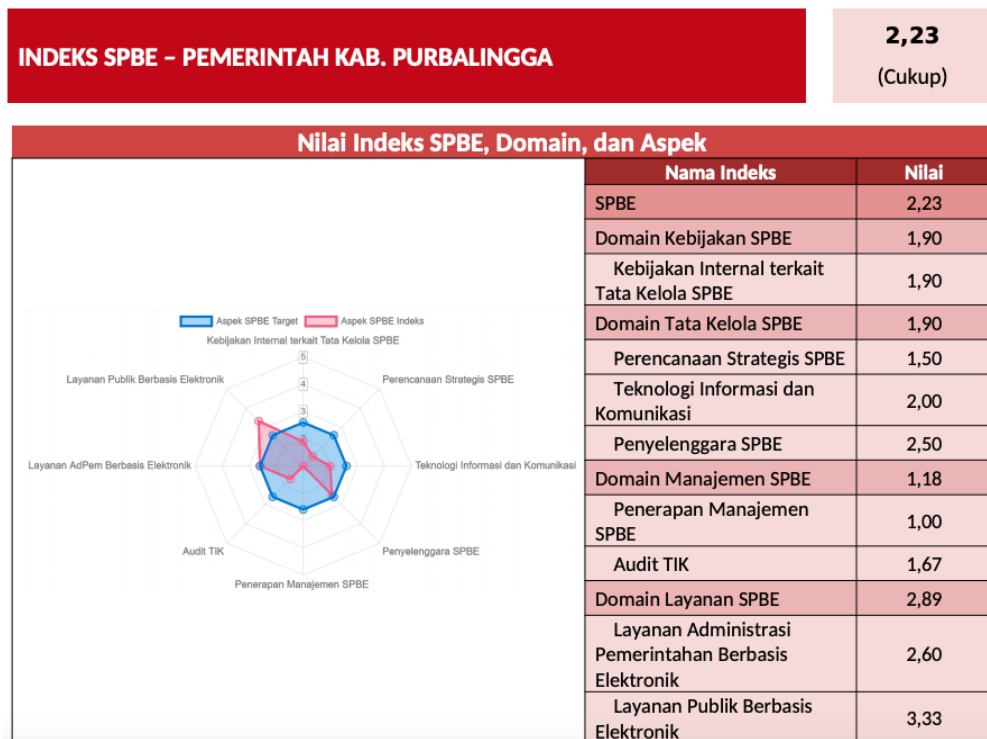
- a. Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi.
- b. Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan nilai tambah layanan kepada pengguna SPBE yang dihasilkan dari perbaikan atau peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, peraturan perundang-undangan, teknologi, ataupun lingkungan internal atau eksternal organisasi. Dampak perubahan dari perbaikan dan peningkatan kualitas layanan diantisipasi dengan penerapan manajemen perubahan sehingga nilai tambah layanan dapat dirasakan oleh pengguna SPBE.

## BAB V

### KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN PURBALINGGA

#### A. HASIL EVALUASI SPBE 2021

Kementerian PANRB pada tahun 2021 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar **2,23 dengan kategori CUKUP**. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga tahun 2021 ditunjukkan oleh tabel berikut.



**Gambar.1 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**

**Tabel . 8 Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2021**

	<b>Nilai Akhir</b>	<b>Penilaian Mandiri</b>
Indeks SPBE	2,23	2,76
Predikat SPBE	Cukup	Baik
<b>Nilai Indeks</b>		
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	1,9	2,6
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,9	2,6
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	1,9	2,1
Perencanaan Strategis SPBE	1,5	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2,25
Penyelenggara SPBE	2,5	2,5
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	1,18	2,27
Penerapan Manajemen SPBE	1	2,38
Audit TIK	1,67	2
<b>Domain Layanan SPBE</b>	2,89	3,34
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6	2,9
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	4

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, tingkat kematangan kapabilitas proses penerapan SPBE Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Untuk **Domain Kebijakan** dengan nilai indek 1,9 dalam kategori **Rintisan menuju** kategori **Terkelola**. Dimana kebijakan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah dilegalisasi, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial atau sektoral sehingga belum mampu mendorong keterpaduan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut.
2. **Domain Tata Kelola** dengan nilai indek 1,9 memiliki kategori **Rintisan menuju** kategori **Terkelola**. Dimana Proses tata kelola SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, dan bersifat reaktif di dalam penerapan SPBE. namun baru diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3. Domain **manajemen SPBE** dengan nilai 1,18 kategori **Rintisan**, dimana proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, dan bersifat reaktif atas inisiatif pimpinan di dalam penerapan SPBE sehingga mengakibatkan pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan. Selain itu, proses tata kelola dan manajemen SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdokumentasi, tidak terorganisasi dengan baik, dan tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi.
4. **Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik** memiliki 2,6 level. Pengukuran kapabilitas layanan mencakup pengukuran tingkat kematangan pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Kriteria tingkat **Interaksi** dimana Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi

tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE. menuju tingkat Transaksi dimana Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas transaksi kepada pengguna SPBE, yaitu beberapa operasi layanan yang menggunakan berbagai sumber daya SPBE dilaksanakan dalam satu transaksi. Sistem elektronik/sistem aplikasi mampu melakukan serangkaian proses kerja secara otomatis (*automatic workflow*) berupa serangkaian komputasi, analitik, validasi, persetujuan, pembayaran finansial, dan notifikasi yang menghasilkan layanan kepada pengguna dalam satu transaksi.

5. **Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan nilai 3,33 dengan kriteria tingkat Transaksi** dimana Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas transaksi kepada pengguna SPBE, yaitu beberapa operasi layanan yang menggunakan berbagai sumber daya SPBE dilaksanakan dalam satu transaksi. Sistem elektronik/sistem aplikasi mampu melakukan serangkaian proses kerja secara otomatis (*automatic workflow*) berupa serangkaian komputasi, analitik, validasi, persetujuan, pembayaran finansial, dan notifikasi yang menghasilkan layanan kepada pengguna dalam satu transaksi. menuju kriteria Kolaborasi dimana Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas kolaborasi atau integrasi antar layanan SPBE. Kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara horisontal, yaitu layanan SPBE yang berbeda dan dihasilkan dari sistem elektronik/sistem aplikasi yang berbeda dapat dikolaborasikan atau diintegrasikan menjadi satu kesatuan alur kerja seperti layanan kepegawaian yang dikolaborasikan dengan layanan keuangan. Selain itu, kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara vertikal, yaitu layanan SPBE yang sama dan dihasilkan dari sistem elektronik/sistem aplikasi yang berbeda dapat

dikolaborasikan atau diintegrasikan secara berjenjang menjadi satu kesatuan layanan, seperti layanan informasi pengadaan secara elektronik yang ada di masing-masing Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat diintegrasikan menjadi satu layanan.

## **B. REKOMENDASI HASIL PENILAIAN SPBE 2021 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Purbalingga, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemkab Purbalingga adalah :

1. Pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yaitu pada :
  - a. **Layanan pengaduan** pelayanan publik yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu aplikasi " MATUR BUPATI ", yang memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.
  - b. Kemudian pada layanan Publik Sektor 2 yaitu sektor perizinan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (**SiCANTIK Cloud**). Merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan usaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa **kelemahan**, khususnya pada aspek kebijakan internal, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK.

1. Perencanaan Strategis SPBE belum tersedia kecuali pada peta rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE. Dikarenakan perencanaan strategisnya belum tersedia
2. Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan dan Kegiatan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman maka berimbas pada aspek penerapan Manajemen SPBE yang sama sekali belum diterapkan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pada Aspek Kebijakan internal, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK sangat perlu menjadi perhatian Pemkab Purbalingga. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

### C. KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, seperti ditunjukkan tabel 9.

***Tabel 9. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE***

<b>No.</b>	<b>Nomor referensi kebijakan</b>	<b>Tentang/ruang lingkup</b>	<b>Jenis kebijakan</b>
1	Nomor 70 Tahun 2010	Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati

2	No 27 Tahun 2011	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement).	Peraturan Bupati
3	No 56 Tahun 2019	Penyelenggaraan E-Government.	Peraturan Bupati
4	No 57 Tahun 2019	Pengembangan Master Plan Smart City Kabupaten Purbalingga.	Peraturan Bupati
5	No 7 Tahun 2021	Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga.	Peraturan Bupati
6	No 90 Tahun 2021	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Bupati (Mengatur secara lengkap tentang Arsitektur SPBE, Peta Rencana, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan Tim Koordinasi)

Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai Arsitektur SPBE, Peta Rencana, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan Tim Koordinasi serta pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Purbalingga.

#### D. TATA KELOLA TIK

Tata Kelola TIK di Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan dalam 3 ( Tiga ) aspek yaitu:

1. Perencanaan Strategis SPBE ( Terdiri dari Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana Dan Anggaran SPBE, serta Inovasi Proses Bisnis SPBE );
2. Adanya pelaksana Teknologi Informasi Dan Komunikasi meliputi Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan ;
3. Adanya penyelenggara SPBE yang terdiri dari tim pengarah, tim koordinasi dan tim kolaborasi SPBE.

**Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Purbalingga**

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Arsitektur SPBE	Belum Ada	Baru memiliki masterplan <i>smart City</i> yang telah ditetapkan dengan Perbup No. 57 tahun 2019 dan DED FO.
2	Peta Rencana SPBE	Belum Ada	Dalam tahap penyusunan dan pembahasan
3	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	Belum Ada	Secara Regulasi Tahapan Proses Penganggaran Tahunan ditetapkan dengan Perbup SPBE No. 90 Tahun 2021 pasal 29 dan belum ada turunannya.
4	Inovasi Proses Bisnis SPBE	Belum Ada	Baru tahap sosialisasi penyusunan proses bisnis
5	Pembangunan Aplikasi SPBE	Ada	Secara Regulasi Tahapan Pengembangan Aplikasi ditetapkan dengan Perbup SPBE No. 90 Tahun 2021 dan sudah ada turunan yang telah ditetapkan dengan SOP No. 473.14/0178
6	Layanan Pusat Data	Belum Ada	Secara Regulasi Tahapan Layanan Pusat Data dengan Perbup SPBE No. 90 Tahun 2021 pasal 14, belum ada SOP Layanan Pusat Data

7	Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Ada	DED FO
8	Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Daerah	Belum Ada	Belum ada SOP Sistem Penghubung Layanan Instansi.
9	Tim Koordinasi SPBE	Ada	ada dan diperbaharui setiap tahun
10	Kolaborasi Penerapan SPBE	Belum Ada	Belum ada tim kolaborasi

#### E. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE terdiri dari :

1. Aspek penerapan manajemen SPBE yaitu Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan , Manajemen Perubahan Dan Manajemen Layanan SPBE.
2. Audit TIK yang terdiri dari Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE.

**Tabel 11. Manajemen SPBE Purbalingga**

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Manajemen Resiko SPBE	Belum Ada	Perlu disusun dan diterapkan manajemen resiko SPBE
2	Manajemen Keamanan Informasi	Belum Ada	Perlu disusun dan diterapkan manajemen keamanan informasi
3	Manajemen Data	Belum Ada	Perlu disusun dan diterapkan manajemen data
4	Manajemen Aset TIK	Sudah Ada	Manajemen aset TIK dapat di pantau melalui <a href="https://unifi.purbalinggakab.go.id/">https://unifi.purbalinggakab.go.id/</a> dan <a href="https://simita.purbalinggaka.go.id">https://simita.purbalinggaka.go.id</a>

5	Manajemen Sumber Daya Manusia	Belum Ada	Perlu adanya perencanaan, monitoring dan evaluasi serta kapasitas SDM TIK
6	Manajemen Pengetahuan	Ada	Penerapan manajemen pengetahuan SPBE menggunakan <a href="https://simpspbe.purbalingga.kab.go.id/">https://simpspbe.purbalingga.kab.go.id/</a>
7	Manajemen Perubahan Dan Manajemen Layanan SPBE	Ada	Manajemen layanan SPBE melalui <a href="https://dilan.purbalinggakab.go.id/">https://dilan.purbalinggakab.go.id/</a> dan <a href="https://layanankominfo.purbalinggakab.go.id">https://layanankominfo.purbalinggakab.go.id</a>
8	Audit Infrastruktur SPBE	Belum Ada	Perlu dilaksanakan audit baik eksternal maupun internal
9	Audit Aplikasi SPBE	Belum Ada	Perlu dilaksanakan audit baik eksternal maupun internal
10	Audit Keamanan SPBE	Belum Ada	Perlu dilaksanakan audit baik eksternal maupun internal

## F. LAYANAN SPBE

Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

1. Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan, layanan pengelolaan barang milik negara, layanan pengawasan internal dan layanan akuntabilitas kinerja serta layanan kinerja berbasis elektronik.
2. Layanan publik berbasis elektronik terdiri dari layanan pengaduan, layanan publik, layanan data terbuka, JDIH, layanan sektor kesehatan, layanan sektor perizinan, layanan sektor administrasi kependudukan, Layanan perencanaan, Layanan penganggaran, Layanan keuangan, Layanan pengadaan barang dan jasa, Layanan kepegawaian, Layanan kearsipan, Layanan pengelolaan barang

milik negara, Layanan pengawasan internal dan layanan akuntabilitas kinerja, Layanan kinerja berbasis elektronik, Layanan pengaduan, Layanan data terbuka, Layanan sektor administrasi kependudukan, Layanan Publik sektor Pendidikan, Layanan Publik Sektor UMKM, Layanan Publik Sektor Pariwisata, Layanan Administrasi Pemerintahan Desa, Layanan Publik Sektor Transportasi , dan Layanan Publik Sektor Sosial.

**Tabel 12. Layanan SPBE**

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Layanan perencanaan	Ada	Menggunakan <a href="https://purbalinggakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah">https://purbalinggakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah</a>
2	Layanan penganggaran	Ada	Menggunakan <a href="https://simkeu-purbalingga.simdacloud.id/">https://simkeu-purbalingga.simdacloud.id/</a>
3	Layanan keuangan	Ada	Menggunakan <a href="https://simkeu-purbalingga.simdacloud.id/">https://simkeu-purbalingga.simdacloud.id/</a>
4	Layanan pengadaan barang dan jasa	Ada	Menggunakan <a href="https://lpse.purbalinggakab.go.id/eproc4">https://lpse.purbalinggakab.go.id/eproc4</a>
5	Layanan kepegawaian,	Ada	Menggunakan <a href="https://e-kepegawaian.purbalinggakab.go.id/">https://e-kepegawaian.purbalinggakab.go.id/</a> perlu dikembangkan untuk layanan pembuatan karis, karsu, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, izin belajar, izin penggunaan gelar, pengajuan cuti, pensiun dan presensi secara elektronik. Pengembangan integrasi e kepegawaian dengan SAPK BKN

6	Layanan kearsipan	Ada	<p>Menggunakan <a href="http://36.66.181.23/sidomas/">http://36.66.181.23/sidomas/</a> (tidak digunakan karena kendala dengan keamanan data.)</p> <p>Simanis (Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis) aplikasi offline</p> <p>Perlu menggunakan layanan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Srikandi). Saat ini sedang tahap pembuatan template surat sesuai tata naskah Dinas &amp; kode klasifikasi surat, tata naskah dinas mendasari perbup, pola kearsipan, klasifikasi arsip, tanda tangan elektronik, yang direncanakan digunakan bulan Juni 2022, dengan tahapan bulan maret menyusun template tata naskah dinas, bulan April dan Mei Melaksanakan pendampingan OPD untuk input instrumen berupa kode klasifikasi surat. Selanjutnya di bulan juni melaksanakan pengajuan permohonan akun ke ANRI, dan dilaksanakan penetapan penerapan aplikasi Srikandi.</p>
7	Layanan pengelolaan barang milik negara	Ada	<p>Menggunakan aplikasi destop sim aset purbalingga 90.220.07.1 dan 108.1.20.07.5</p> <p>Perlu dikembangkan menggunakan aplikasi web.</p>
8	Layanan pengawasan internal dan layanan akuntabilitas kinerja	Ada	<p>Menggunakan <a href="http://wbs.purbalinggakab.go.id">wbs.purbalinggakab.go.id</a></p> <p>simwas HP offline (Sistem Pengawasan Hasil Pemeriksaan)</p> <p>Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa)</p>

			WBS perlu disosialisasikan lebih lanjut.
9	Layanan kinerja berbasis elektronik.	Ada	Menggunakan <a href="http://e-kinerja.purbalinggakab.go.id">e-kinerja.purbalinggakab.go.id</a> digunakan untuk penyusunan SKP, Rencana kerja bulanan dan pencatatan kinerja harian. Ke Depan perlu dikembangkan untuk penghitungan tukin
10	Layanan pengaduan	Ada	Menggunakan <a href="http://maturbub.purbalinggakab.go.id">maturbub.purbalinggakab.go.id</a>
12	Layanan data terbuka	Ada	<a href="http://data.purbalinggakab.go.id">data.purbalinggakab.go.id</a> perlu dilakukan evaluasi tentang konten data yang dipublish berdasarkan jenis data yang wajib dipublikasikan selain jenis data yang dikecualikan
13	JDIH	Ada	<a href="http://jdih.purbalinggakab.go.id">jdih.purbalinggakab.go.id</a> perlu dilakukan update data secara berkelanjutan
14	layanan Publik sektor kesehatan	Ada	Layanan pendaftaran online rumah sakit, Layanan antrian, Cek ketersediaan kamar kosong. PSC 119 Purbalingga (Aplikasi android call center kegawatdaruratan bidang kesehatan, Layanan di puskesmas, <a href="http://36.66.164.123:88/">http://36.66.164.123:88/</a> , Aplikasi android "Panti Nugroho Mobile",  perlu dikembangkan layanan kesehatan lain IRT(Perizinan PIRT) perlu penggantian domain <a href="https://admin.psc119purbalingga.com/login">https://admin.psc119purbalingga.com/login</a> menggunakan domain resmi pemerintah

15	Layanan Publik sektor perijinan	Ada	<p>Menggunakan SiCantik perlu dikembangkan untuk penggunaan izin lainnya selain sektor kesehatan &amp; dikembangkan dengan tanda tangan elektronik bagi OPD pemberi rekomendasi (DPMPTSP)</p> <p>SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung)  <a href="https://simbg.pu.go.id/">https://simbg.pu.go.id/</a></p> <p>Menggunakan aplikasi Nasional Rekomendasi penerbitan site plan / rencana tapak perumahan formal (masih manual)</p> <p>SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan ) DPU PR, Perumahan formal &amp; swadaya  <a href="https://sibaru.perumahan.pu.go.id/">https://sibaru.perumahan.pu.go.id/</a></p> <p>SIMPERUM (Sistem Informasi Perumahan) Aplikasi Propinsi  <a href="https://simperum.disperakim.jatengprov.go.id/">https://simperum.disperakim.jatengprov.go.id/</a></p> <p>SIMANIS CIKA (Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi Bidang Keciptakayaan)  <a href="http://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/">http://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/</a> usulan Kabupaten</p> <p>SINTA / Sistem Informasi Pertanahan (data dan sewa tanah ex bengkok)</p> <p>Rekomendasi perizinan toko modern sebelum adanya OSS  Aplikasi perkembangan harga (SIMHP)  <a href="https://simhp.purbalinggakab.go.id/">https://simhp.purbalinggakab.go.id/</a></p>

			<p>sihati <a href="https://hargajateng.org/">https://hargajateng.org/</a>  Perizinan usaha ikan, penerbitan registrasi PSATPDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil)  Aplikasi SIG (Satpol PP) terkait peta rawan  BPPD : <a href="http://indra.bnppb.go.id">indra.bnppb.go.id</a>  <a href="https://inarisk.bnppb.go.id/">https://inarisk.bnppb.go.id/</a>  12 ews : tanah longsor di sanguwatang, darma (rusak). kaliori, panusupan, gunungwuled, panusupan, sirau 4, tumanggal, bpbd, (terjadi pergerakan tanah masuk ke sms admin.  DINAKER : Aplikasi <a href="https://pelatihan.kemnaker.go.id/">https://pelatihan.kemnaker.go.id/</a>  <a href="https://bursakerja.jatengprov.go.id/home/login/">https://bursakerja.jatengprov.go.id/home/login/</a>, e makaryo untuk pembuatan kartu kuning</p>
16	Layanan sektor administrasi kependudukan	Ada	<a href="http://optima.purbalinggakab.go.id">optima.purbalinggakab.go.id</a>
17	Layanan Publik sektor Pendidikan	Ada	<p>Menggunakan Aplikasi <a href="https://dapo.kemdikbud.go.id/">https://dapo.kemdikbud.go.id/</a>  <a href="https://rkas.kemdikbud.go.id/">https://rkas.kemdikbud.go.id/</a>  Digunakan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah</p>
18	Layanan Publik Sektor UMKM	Ada	<p>Bidang Koperasi dan UMKM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajuan NIK nomor induk koperasi, melalui Pronik</li> <li>- Perijinan kop melalui ODS ( Online Data System), online single submission <a href="https://cag.depkop.go.id">https://cag.depkop.go.id</a></li> <li>- Perijinan UMKM melalui OSS untuk Pendaftaran Hak Merk,</li> </ul>

			<p>NIB ( Nomor Induk Berusaha)  <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuka Tuku store (online dan offline)  <a href="https://www.bukalapak.com/u/tukatukupbg">https://www.bukalapak.com/u/tukatukupbg</a> dan  <a href="https://shopee.co.id/tukatukupbalingga">https://shopee.co.id/tukatukupbalingga</a> offline di Taman Kota Usman Janatin</li> <li>- Layanan pembelian BBM Solar secara offline,</li> <li>- Buku Tamu Digital PLUT  <a href="https://bit.ly/plutpbg">https://bit.ly/plutpbg</a>,</li> <li>- Rumah BUMN Purbalingga  <a href="https://rkb.id">https://rkb.id</a></li> <li>- Website DINKOPUKM Purbalingga  <a href="https://dinkopukm.purbalinggakab.go.id">https://dinkopukm.purbalinggakab.go.id</a></li> <li>- Sosmed DINKOPUKM, PLUT dan RB Pbg (FB &amp; IG)</li> </ul>
19	Layanan Publik Sektor Pariwisata		Perlu dikembangkan layanan informasi sektor pariwisata berbasis android
20	Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Ada	Siskeudes, SID <a href="https://spanint.kemenkeu.go.id/">https://spanint.kemenkeu.go.id/</a> untuk laporan penggunaan DD <a href="https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id/">https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id/</a>
21	Layanan Publik Sektor Transportasi	Ada	Informasi tentang tarif pengujian kendaraan <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=id.dinhubpbg">https://play.google.com/store/apps/details?id=id.dinhubpbg</a> SIMPJU offline memuat data koordinat LPJU di Kab. Purbalingga yang akan dikembangkan secara online dengan pengaduan SIM Trayek, aplikasi offline untuk perizinan trayek & rekomendasi SIM Parkir berisi data petugas

			parkir
22	Layanan Publik Sektor Sosial	Belum ada	Akan dikembangkan aplikasi untuk pelayanan kesejahteraan sosial (berdasarkan BDT)
23	Layanan Publik Sektor Pangan dan Perikanan	Ada	<p>SIMONSTOK APP dan <a href="https://aksespangan.com/login">https://aksespangan.com/login</a> digunakan untuk input laporan stok dan harga pangan strategis dari kementerian pertanian</p> <p><a href="https://sislogda.jatengprov.go.id/index">https://sislogda.jatengprov.go.id/index</a> dan <a href="http://panelharga.bkp.pertanian.go.id/">http://panelharga.bkp.pertanian.go.id/</a></p> <p>SATU DATA KKP aplikasi dari Kementerian kelautan perikanan yang digunakan untuk memastikan data dan informasi dengan integritas tinggi</p> <p><a href="https://neraca.aksespangan.com">https://neraca.aksespangan.com</a> aplikasi yang digunakan untuk mencermati kebutuhan dan pemenuhan pangan rumah tangga di daerah</p> <p><a href="https://skpg.bkp.pertanian.go.id">https://skpg.bkp.pertanian.go.id</a> dari kementerian pertanian yang digunakan untuk menyediakan data dan informasi tentang keadaan pangan dan gizi secara rutin</p> <p>Aplikasi harmonisasi PPH Susenas yang digunakan untuk menghitung estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah berdasarkan data proyeksi konsumsi pangan penduduk</p>

24	Layanan Publik sektor Ketenagakerjaan	Ada	<p>Aplikasi Tka Daerah dari Kemnaker, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing)  <a href="https://tka-online.kemnaker.go.id/">https://tka-online.kemnaker.go.id/</a></p> <p>Sisko TKLN Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri  <a href="http://siskotkln.bnp2tki.go.id/">http://siskotkln.bnp2tki.go.id/</a></p> <p>e-Makaryo  <a href="https://bursakerja.jatengprov.go.id/">https://bursakerja.jatengprov.go.id/</a></p> <p>Aplikasi Sistem Manajemen Prakerja  <a href="https://prakerja.purbalinggakab.go.id/">https://prakerja.purbalinggakab.go.id/</a></p>

## G. SISTEM INFORMASI

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti ditunjukkan tabel 11.

**Tabel 11. Daftar Website OPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga**

NO	PERANGKAT DAERAH	WEBSITE	STATUS (AKTIF / TIDAK AKTIF)
1	Bupati	<a href="https://bupati.purbalinggakab.go.id">https://bupati.purbalinggakab.go.id</a>	AKTIF
2	Sekretariat DPRD	<a href="https://sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id">https://sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id</a>	AKTIF

3	Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)	<a href="https://bakeuda.purbalinggakab.go.id">https://bakeuda.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	<a href="https://bkppd.purbalinggakab.go.id">https://bkppd.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<a href="https://bpbd.purbalinggakab.go.id">https://bpbd.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	<a href="https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id">https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
7	Inspektorat Daerah	<a href="https://inspektorat.purbalinggakab.go.id">https://inspektorat.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
8	RSUD Kabupaten	<a href="https://rsud.purbalinggakab.go.id">https://rsud.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
9	Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)	<a href="https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id">https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
10	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	<a href="https://dlh.purbalinggakab.go.id">https://dlh.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
11	Dinas Perhubungan (Dinhub)	<a href="https://dinhub.purbalinggakab.go.id">https://dinhub.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	<a href="https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id">https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkopukm)	<a href="https://dinkopukm.purbalinggakab.go.id">https://dinkopukm.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)	<a href="https://dindikbud.purbalinggakab.go.id">https://dindikbud.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil)	<a href="https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id">https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
16	Dinas Pertanian (Dinperten)	<a href="https://dinperten.purbalinggakab.go.id">https://dinperten.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
17	Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim)	<a href="https://dinrumkim.purbalinggakab.go.id">https://dinrumkim.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes)	<a href="https://dinpermasdes.purbalinggakab.go.id">https://dinpermasdes.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	<a href="https://dinporapar.purbalinggakab.go.id">https://dinporapar.purbalinggakab.go.id</a> <a href="https://infowisata.purbalinggakab.go.id">https://infowisata.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>

	(Dinporapar)		
20	Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker)	<a href="https://dinnaker.purbalinggakab.go.id">https://dinnaker.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
21	Dinas Kesehatan (Dinkes)	<a href="https://dinkes.purbalinggakab.go.id">https://dinkes.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
22	Dinsosdalduk KBP3A	<a href="https://dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id">https://dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	<a href="https://dpupr.purbalinggakab.go.id">https://dpupr.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag)	<a href="https://dinperindag.purbalinggakab.go.id">https://dinperindag.purbalinggakab.go.i d</a>	<b>AKTIF</b>
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarspus)	<a href="https://dinarspus.purbalinggakab.go.id">https://dinarspus.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP)	<a href="https://dkpp.purbalinggakab.go.id">https://dkpp.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
27	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	<a href="https://satpolpp.purbalinggakab.go.id">https://satpolpp.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
28	Pembina Kesejahteraan Keluarga(PKK)	<a href="https://pkk.purbalinggakab.go.id">https://pkk.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>
29	RSKBD Panti Nugroho	<a href="https://rspantinugroho.purbalinggakab.go.id">https://rspantinugroho.purbalinggakab.go.id</a>	<b>AKTIF</b>

**Tabel 12. Daftar email OPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>EMAIL</b>
1	Bupati Purbalingga	bupati@purbalinggakab.go.id
2	Sekretariat DPRD	sekretariatdprd@purbalinggakab.go.id
3	Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)	bakeuda@purbalinggakab.go.id
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	bkd@purbalinggakab.go.id
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	bpbd@purbalinggakab.go.id
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	bappelitbangda@purbalinggakab.go.id

7	Inspektorat Daerah	inspektorat@purbalinggakab.go.id
8	RSUD Kabupaten	rsud@purbalinggakab.go.id
9	Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)	dinkominfo@purbalinggakab.go.id
10	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	dlh@purbalinggakab.go.id
11	Dinas Perhubungan (Dinhub)	dinhub@purbalinggakab.go.id
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	dpmpstsp@purbalinggakab.go.id
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkopukm)	dinkopukm@purbalinggakab.go.id
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)	disdik@purbalinggakab.go.id
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil)	dinpendukcapil@purbalinggakab.go.id
16	Dinas Pertanian (Dinpertan)	dinpertan@purbalinggakab.go.id
17	Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim)	dinrumkim@purbalinggakab.go.id
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes)	dinpermasdes@purbalinggakab.go.id
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar)	dinporapar@purbalinggakab.go.id
20	Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker)	dinnaker@purbalinggakab.go.id
21	Dinas Kesehatan (Dinkes)	dkk@purbalinggakab.go.id
22	Dinsosdalduk KBP3A	dinsosdaldukkbp3a@purbalinggakab.go.id
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	dpupr@purbalinggakab.go.id
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag)	dinperindag@purbalinggakab.go.id
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarspus)	dinarspus@purbalinggakab.go.id
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP)	dkpp@purbalinggakab.go.id

27	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	satpolpp@purbalinggakab.go.id
28	RSKBD Panti Nugroho	rsudpantinugroho@purbalinggakab.go.id

**Tabel 13. Daftar Website Kecamatan Kabupaten Purbalingga**

NO	KECAMATAN	WEBSITE
1	Kecamatan Kemangkon	<a href="https://kecamatankemangkon.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankemangkon.purbalinggakab.go.id/</a>
2	Kecamatan Bukateja	<a href="https://kecamatanbukateja.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatanbukateja.purbalinggakab.go.id/</a>
3	Kecamatan Kejobong	<a href="https://kecamatankejobong.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankejobong.purbalinggakab.go.id/</a>
4	Kecamatan Pengadegan	<a href="https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/</a>
5	Kecamatan Kaligondang	<a href="https://kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id/</a>
6	Kecamatan Purbalingga	<a href="https://kecamatanpurbalingga.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatanpurbalingga.purbalinggakab.go.id/</a>
7	Kecamatan Kalimanah	<a href="https://kecamatankalimanah.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankalimanah.purbalinggakab.go.id/</a>
8	Kecamatan Padamara	<a href="https://kecamatanpadamara.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatanpadamara.purbalinggakab.go.id/</a>
9	Kecamatan Kutasari	<a href="https://kecamatankutasari.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankutasari.purbalinggakab.go.id/</a>
10	Kecamatan Bojongsari	<a href="https://kecamatanbojongsari.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatanbojongsari.purbalinggakab.go.id/</a>
11	Kecamatan Mrebet	<a href="https://kecamatanmrebet.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatanmrebet.purbalinggakab.go.id/</a>
12	Kecamatan Bobotsari	<a href="https://kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id/</a>
13	Kecamatan Karangreja	<a href="https://kecamatankarangreja.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankarangreja.purbalinggakab.go.id/</a>
14	Kecamatan Karangjambu	<a href="https://kecamatankarangjambu.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankarangjambu.purbalinggakab.go.id/</a>
15	Kecamatan Karanganyar	<a href="https://kecamatankaranganyar.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankaranganyar.purbalinggakab.go.id/</a>
16	Kecamatan Kertanegara	<a href="https://kecamatankertanegara.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankertanegara.purbalinggakab.go.id/</a>
17	Kecamatan Karangmoncol	<a href="https://kecamatankarangmoncol.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatankarangmoncol.purbalinggakab.go.id/</a>
18	Kecamatan	<a href="https://kecamatanrembang.purbalinggakab.go.id/">https://kecamatanrembang.purbalinggakab.go.id/</a>

	Rembang	
--	---------	--

**Tabel 14. Daftar Email Kecamatan Kabupaten Purbalingga**

NO	KECAMATAN	EMAIL
1	Kecamatan Kemangkon	kemangkon@purbalinggakab.go.id
2	Kecamatan Bukateja	bukateja@purbalinggakab.go.id
3	Kecamatan Kejobong	kejobong@purbalinggakab.go.id
4	Kecamatan Pengadegan	pengadegan@purbalinggakab.go.id
5	Kecamatan Kaligondang	kaligondang@purbalinggakab.go.id
6	Kecamatan Purbalingga	purbalingga@purbalinggakab.go.id
7	Kecamatan Kalimanah	kalimanah@purbalinggakab.go.id
8	Kecamatan Padamara	padamara@purbalinggakab.go.id
9	Kecamatan Kutasari	kutasari@purbalinggakab.go.id
10	Kecamatan Bojongsari	bojongsari@purbalinggakab.go.id
11	Kecamatan Mrebet	mrebet@purbalinggakab.go.id
12	Kecamatan Bobotsari	bobotsari@purbalinggakab.go.id
13	Kecamatan Karangreja	karangreja@purbalinggakab.go.id
14	Kecamatan Karangjambu	karangjambu@purbalinggakab.go.id
15	Kecamatan Karanganyar	karanganyar@purbalinggakab.go.id
16	Kecamatan Kertanegara	kertanegara@purbalinggakab.go.id
17	Kecamatan Karangmoncol	karangmoncol@purbalinggakab.go.id
18	Kecamatan Rembang	rembang@purbalinggakab.go.id

**Tabel 15. Daftar Website Kelurahan Kabupaten Purbalingga**

NO	KELURAHAN	WEBSITE
1	Kelurahan Bojong	<a href="https://kelurahanbojong.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahanbojong.purbalinggakab.go.id/</a>
2	Kelurahan Kedungmenjangan	<a href="https://kelurahankedungmenjangan.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahankedungmenjangan.purbalinggakab.go.id/</a>
3	Kelurahan Bancar	<a href="https://kelurahanbancar.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahanbancar.purbalinggakab.go.id/</a>
4	Kelurahan Purbalingga Wetan	<a href="https://kelurahangatan.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahangatan.purbalinggakab.go.id/</a>
5	Kelurahan Purbalingga Lor	<a href="https://kelurahangalor.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahangalor.purbalinggakab.go.id/</a>
6	Kelurahan Purbalingga Kidul	<a href="https://kelurahangadul.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahangadul.purbalinggakab.go.id/</a>
7	Kelurahan	<a href="https://kelurahangalon.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahangalon.purbalinggakab.go.id/</a>

	Purbalingga Kulon	
8	Kelurahan Penambongan	<a href="https://kelurahanpenambongan.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahanpenambongan.purbalinggakab.go.id/</a>
9	Kelurahan Kandangampang	<a href="https://kelurahankandangampang.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahankandangampang.purbalinggakab.go.id</a>
10	Kelurahan Kembaran Kulon	<a href="https://kelurahankembarankulon.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahankembarankulon.purbalinggakab.go.id/</a>
11	Kelurahan Wirasana	<a href="https://kelurahanwirasana.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahanwirasana.purbalinggakab.go.id/</a>
12	Kelurahan Kalikabong	<a href="https://kelurahankalikabong.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahankalikabong.purbalinggakab.go.id/</a>
13	Kelurahan Karangmanyar	<a href="https://kelurahankarangmanyar.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahankarangmanyar.purbalinggakab.go.id/</a>
14	Kelurahan Mewek	<a href="https://kelurahanmewek.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahanmewek.purbalinggakab.go.id/</a>
15	Kelurahan Karangsentul	<a href="https://kelurahankarangsantul.purbalinggakab.go.id/">https://kelurahankarangsantul.purbalinggakab.go.id/</a>

**Tabel 16. Daftar Website Desa Kabupaten Purbalingga**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>WEBSITE</b>
1	Sinduraja	<a href="https://sinduraja.desa.id/">https://sinduraja.desa.id/</a>
2	Kalikajar	<a href="https://kalikajar.desa.id/">https://kalikajar.desa.id/</a>
3	Arenan	<a href="https://arenan.desa.id/">https://arenan.desa.id/</a>
4	Sempor Lor	<a href="https://semporlor.desa.id/">https://semporlor.desa.id/</a>
5	Lamongan	<a href="https://lamongan-purbalingga.desa.id/">https://lamongan-purbalingga.desa.id/</a>
6	Sidanegara	<a href="https://sidanegara.desa.id/">https://sidanegara.desa.id/</a>
7	Selakambang	<a href="https://selakambang.desa.id/">https://selakambang.desa.id/</a>
8	Tejasari	<a href="https://tejasari.desa.id/">https://tejasari.desa.id/</a>
9	Brecek	<a href="https://brecek.desa.id/">https://brecek.desa.id/</a>
10	Penaruban	<a href="https://penaruban.desa.id/">https://penaruban.desa.id/</a>
11	Cilapar	<a href="https://cilapar.desa.id/">https://cilapar.desa.id/</a>
12	Penolih	<a href="https://penolih.desa.id/">https://penolih.desa.id/</a>
13	Kaligondang	<a href="https://kaligondang.desa.id/">https://kaligondang.desa.id/</a>
14	Kembaran Wetan	<a href="https://kembaranwetan.desa.id/">https://kembaranwetan.desa.id/</a>
15	Gembong	<a href="https://gembong.desa.id/">https://gembong.desa.id/</a>
16	Bojongsari	<a href="https://bojongsari-purbalingga.desa.id/">https://bojongsari-purbalingga.desa.id/</a>
17	Kajongan	<a href="https://kajongan.desa.id/">https://kajongan.desa.id/</a>

18	Brobot	<a href="https://brobot.desa.id/">https://brobot.desa.id/</a>
19	Metenggeng	<a href="https://metenggeng.desa.id/">https://metenggeng.desa.id/</a>
20	Galuh	<a href="https://galuh.desa.id/">https://galuh.desa.id/</a>
21	Bumisari	<a href="https://bumisari-purbalingga.desa.id/">https://bumisari-purbalingga.desa.id/</a>
22	Patemon	<a href="https://patemon.desa.id/">https://patemon.desa.id/</a>
23	Pekalongan	<a href="https://pekalongan-purbalingga.desa.id/">https://pekalongan-purbalingga.desa.id/</a>
24	Karangbanjar	<a href="https://karangbanjar.desa.id/">https://karangbanjar.desa.id/</a>
25	Candiwulan	<a href="https://candiwulan.desa.id/">https://candiwulan.desa.id/</a>
26	Karangjengkol	<a href="https://karangjengkol.desa.id/">https://karangjengkol.desa.id/</a>
27	Munjul	<a href="https://munjul.desa.id/">https://munjul.desa.id/</a>
28	Cendana	<a href="https://cendana.desa.id/">https://cendana.desa.id/</a>
29	Limbangan	<a href="https://limbangan.desa.id/">https://limbangan.desa.id/</a>
30	Karanglewas	<a href="https://karanglewas.desa.id/">https://karanglewas.desa.id/</a>
31	Candinata	<a href="https://candinata.desa.id/">https://candinata.desa.id/</a>
32	Karangcegak	<a href="https://karangcegak.desa.id/">https://karangcegak.desa.id/</a>
33	Karangklesem	<a href="https://karangklesem.desa.id/">https://karangklesem.desa.id/</a>
34	Sumingkir	<a href="https://sumingkir.desa.id/">https://sumingkir.desa.id/</a>
35	Dagan	<a href="https://dagan.desa.id/">https://dagan.desa.id/</a>
36	Banjarsari	<a href="https://banjarsari.desa.id/">https://banjarsari.desa.id/</a>
37	Karangmalang	<a href="https://karangmalang.desa.id/">https://karangmalang.desa.id/</a>
38	Gandasuli	<a href="https://gandasuli.desa.id/">https://gandasuli.desa.id/</a>
39	Limbasari	<a href="https://limbasari.desa.id/">https://limbasari.desa.id/</a>
40	Karangtalun	<a href="https://karangtalun.desa.id/">https://karangtalun.desa.id/</a>
41	Majapura	<a href="https://majapura.desa.id/">https://majapura.desa.id/</a>
42	Karangkemiri	<a href="https://karangkemiri.desa.id/">https://karangkemiri.desa.id/</a>
43	Sumilir	<a href="https://sumilir.desa.id/">https://sumilir.desa.id/</a>
44	Muntang	<a href="https://muntang.desa.id/">https://muntang.desa.id/</a>
45	Pelumutan	<a href="https://pelumutan.desa.id/">https://pelumutan.desa.id/</a>
46	Jetis	<a href="https://jetis-purbalingga.desa.id/">https://jetis-purbalingga.desa.id/</a>
47	Kedungbenda	<a href="http://kedungbenda.desa.id/">http://kedungbenda.desa.id/</a>
48	Toyareka	<a href="https://toyareka.desa.id/">https://toyareka.desa.id/</a>
49	Bokol	<a href="https://bokol.desa.id/">https://bokol.desa.id/</a>
50	Tangkisan	<a href="https://tangkisan.desa.id/">https://tangkisan.desa.id/</a>
51	Karangturi	<a href="https://karangturi.desa.id/">https://karangturi.desa.id/</a>
52	Serayu Larangan	<a href="https://serayularangan.desa.id/">https://serayularangan.desa.id/</a>

53	Selaganggeng	<a href="https://selaganggeng.desa.id/">https://selaganggeng.desa.id/</a>
54	Bojong	<a href="https://bojong.desa.id/">https://bojong.desa.id/</a>
55	Binangun	<a href="https://binangun.desa.id/">https://binangun.desa.id/</a>
56	Mangunegara	<a href="https://mangunegara.desa.id/">https://mangunegara.desa.id/</a>
57	Onje	<a href="https://onje.desa.id/">https://onje.desa.id/</a>
58	Lambur	<a href="https://lambur.desa.id/">https://lambur.desa.id/</a>
59	Sangkanayu	<a href="https://sangkanayu.desa.id/">https://sangkanayu.desa.id/</a>
60	Campakoah	<a href="https://campakoah.desa.id/">https://campakoah.desa.id/</a>
61	Kaliori	<a href="https://kaliori-purbalingga.desa.id/">https://kaliori-purbalingga.desa.id/</a>
62	Bungkanel	<a href="https://bungkanel.desa.id/">https://bungkanel.desa.id/</a>
63	Karanganyar	<a href="https://karanganyar.desa.id/">https://karanganyar.desa.id/</a>
64	Karanggedang	<a href="https://karanggedang.desa.id/">https://karanggedang.desa.id/</a>
65	Ponjen	<a href="https://ponjen.desa.id/">https://ponjen.desa.id/</a>
66	Brakas	<a href="https://brakas.desa.id/">https://brakas.desa.id/</a>
67	Maribaya	<a href="https://maribaya.desa.id/">https://maribaya.desa.id/</a>
68	Bantarbarang	<a href="https://bantarbarang.desa.id/">https://bantarbarang.desa.id/</a>
69	Panusupan	<a href="https://panusupan.desa.id/">https://panusupan.desa.id/</a>
70	Makam	<a href="https://makam.desa.id/">https://makam.desa.id/</a>
71	Bodas Karangjati	<a href="https://bodaskarangjati.desa.id/">https://bodaskarangjati.desa.id/</a>
72	Karangbawang	<a href="https://karangbawang-purbalingga.desa.id/">https://karangbawang-purbalingga.desa.id/</a>
73	Gunungwuled	<a href="https://gunungwuled.desa.id/">https://gunungwuled.desa.id/</a>
74	Wanogara Kulon	<a href="https://wanogarakulon.desa.id/">https://wanogarakulon.desa.id/</a>
75	Losari	<a href="https://losari-purbalingga.desa.id/">https://losari-purbalingga.desa.id/</a>
76	Tanalum	<a href="https://tanalum.desa.id/">https://tanalum.desa.id/</a>
77	Sumampir	<a href="https://sumampir.desa.id/">https://sumampir.desa.id/</a>
78	Wanogara Wetan	<a href="https://wanogarawetan.desa.id/">https://wanogarawetan.desa.id/</a>
79	Dawuhan	<a href="https://dawuhan-purbalingga.desa.id/">https://dawuhan-purbalingga.desa.id/</a>
80	Karangjambe	<a href="https://karangjambe.desa.id/">https://karangjambe.desa.id/</a>
81	Karangpule	<a href="https://karangpule.desa.id/">https://karangpule.desa.id/</a>
82	Karanggambas	<a href="https://karanggambas.desa.id/">https://karanggambas.desa.id/</a>
83	Purbayasa	<a href="https://purbayasa-purbalingga.desa.id/">https://purbayasa-purbalingga.desa.id/</a>
84	Sokawera	<a href="https://sokawera.desa.id/">https://sokawera.desa.id/</a>
85	Kalitinggar	<a href="https://kalitinggar.desa.id/">https://kalitinggar.desa.id/</a>
86	Karangreja	<a href="https://karangreja.desa.id/">https://karangreja.desa.id/</a>
87	Tlahab Lor	<a href="https://tlahablor.desa.id/">https://tlahablor.desa.id/</a>

88	Siwarak	<a href="https://siwarak.desa.id/">https://siwarak.desa.id/</a>
89	Tlahab Kidul	<a href="https://tlahabkidul.desa.id/">https://tlahabkidul.desa.id/</a>
90	Kedarpan	<a href="https://kedarpan.desa.id/">https://kedarpan.desa.id/</a>
91	Pandansari	<a href="http://pandansari-purbalingga.desa.id/">http://pandansari-purbalingga.desa.id/</a>
92	Nangkod	<a href="https://nangkod.desa.id/">https://nangkod.desa.id/</a>
93	bandingan	<a href="https://bandingan-purbalingga.desa.id/">https://bandingan-purbalingga.desa.id/</a>
94	Nangkasawit	<a href="https://nangkasawit.desa.id/">https://nangkasawit.desa.id/</a>
95	Gumiwang	<a href="https://gumiwang.desa.id/">https://gumiwang.desa.id/</a>
96	Kejobong	<a href="https://kejobong.desa.id/">https://kejobong.desa.id/</a>
97	Langgar	<a href="https://langgar.desa.id/">https://langgar.desa.id/</a>
98	Timbang	<a href="https://timbang-purbalingga.desa.id/">https://timbang-purbalingga.desa.id/</a>
99	Sokanegara	<a href="https://sokanegara.desa.id/">https://sokanegara.desa.id/</a>
100	Lamuk	<a href="https://lamuk.desa.id/">https://lamuk.desa.id/</a>
101	Karangtengah	<a href="http://karangtengah.desa.id/">http://karangtengah.desa.id/</a>
102	Langkap	<a href="https://langkap.desa.id/">https://langkap.desa.id/</a>
103	Kertanegara	<a href="https://kertanegara-purbalingga.desa.id/">https://kertanegara-purbalingga.desa.id/</a>
104	Krangean	<a href="https://krangean.desa.id/">https://krangean.desa.id/</a>
105	Condong	<a href="https://condong.desa.id/">https://condong.desa.id/</a>
106	Adiarsa	<a href="https://adiarsa.desa.id/">https://adiarsa.desa.id/</a>
107	Mergasana	<a href="https://mergasana.desa.id/">https://mergasana.desa.id/</a>
108	Kasih	<a href="https://kasih.desa.id/">https://kasih.desa.id/</a>
109	Kalimanah Wetan	<a href="https://kalimanahwetan.desa.id/">https://kalimanahwetan.desa.id/</a>
110	Blater	<a href="https://blater.desa.id/">https://blater.desa.id/</a>
111	Klapa Sawit	<a href="https://klapasawit.desa.id/">https://klapasawit.desa.id/</a>
112	Manduraga	<a href="https://manduraga.desa.id/">https://manduraga.desa.id/</a>
113	Sidakangen	<a href="https://sidakangen.desa.id/">https://sidakangen.desa.id/</a>
114	Rabak	<a href="https://rabak.desa.id/">https://rabak.desa.id/</a>
115	Jompo	<a href="https://jompo.desa.id/">https://jompo.desa.id/</a>
116	Selabaya	<a href="https://selabaya.desa.id/">https://selabaya.desa.id/</a>
117	Karangpetir	<a href="https://karangpetir.desa.id/">https://karangpetir.desa.id/</a>
118	Karangjambu	<a href="http://karangjambu.desa.id/first">http://karangjambu.desa.id/first</a>
119	Danasari	<a href="https://danasari.desa.id/">https://danasari.desa.id/</a>
120	Sirandu	<a href="https://sirandu.desa.id/">https://sirandu.desa.id/</a>
121	Sanguwatang	<a href="https://sanguwatang.desa.id/">https://sanguwatang.desa.id/</a>
122	Tajug	<a href="https://tajug.desa.id/">https://tajug.desa.id/</a>

123	Grantung	<a href="https://grantung.desa.id/">https://grantung.desa.id/</a>
124	Karangsari	<a href="https://karangsari-karangmoncol.desa.id/">https://karangsari-karangmoncol.desa.id/</a>
125	Pepedan	<a href="https://pepedan-purbalingga.desa.id/">https://pepedan-purbalingga.desa.id/</a>
126	Bedagas	<a href="https://bedagas.desa.id/">https://bedagas.desa.id/</a>
127	Tumanggal	<a href="https://tumanggal.desa.id/">https://tumanggal.desa.id/</a>
128	Tegalpingen	<a href="https://tegalpingen.desa.id/">https://tegalpingen.desa.id/</a>
129	Larangan	<a href="https://larangan.desa.id/">https://larangan.desa.id/</a>
130	Tetel	<a href="https://tetel.desa.id/">https://tetel.desa.id/</a>
131	Kedungjati	<a href="https://kedungjati.desa.id/">https://kedungjati.desa.id/</a>
132	Karancengis	<a href="https://karancengis.desa.id/">https://karancengis.desa.id/</a>
133	Karanggedang	<a href="https://karanggedang-purbalingga.desa.id/">https://karanggedang-purbalingga.desa.id/</a>

**Tabel 17. Daftar Website Puskesmas Kabupaten Purbalingga**

NO	PUSKESMAS	WEBSITE
1	Puskesmas Kemangkon	<a href="https://puskesmaskemangkon.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskemangkon.purbalinggakab.go.id/</a>
2	Puskesmas Bukateja	<a href="https://puskesmasbukateja.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmasbukateja.purbalinggakab.go.id/</a>
3	Puskesmas Kutawis	<a href="https://puskesmaskutawis.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskutawis.purbalinggakab.go.id/</a>
4	Puskesmas Kejobong	<a href="https://puskesmaskejobong.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskejobong.purbalinggakab.go.id/</a>
5	Puskesmas Pengadegan	<a href="https://puskesmaspengadegan.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaspengadegan.purbalinggakab.go.id</a>
6	Puskesmas Kaligondang	<a href="https://puskesmaskaligondang.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskaligondang.purbalinggakab.go.id</a>
7	Puskesmas Kalikajar	<a href="https://puskesmaskalikajar.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskalikajar.purbalinggakab.go.id/</a>
8	Puskesmas Purbalingga	<a href="https://puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id/</a>
9	Puskesmas Bojong	<a href="https://puskesmasbojong.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmasbojong.purbalinggakab.go.id/</a>
10	Puskesmas Kalimanah	<a href="https://puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id/</a>
11	Puskesmas Padamara	<a href="https://puskesmaspadamara.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaspadamara.purbalinggakab.go.id/</a>
12	Puskesmas Kutasari	<a href="https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/</a>
13	Puskesmas Bojongsari	<a href="https://puskesmasbojongsari.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmasbojongsari.purbalinggakab.go.id/</a>
14	Puskesmas Serayu Larangan	<a href="https://puskesmasserayularangan.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmasserayularangan.purbalinggakab.go.id/</a>
15	Puskesmas Mrebet	<a href="https://puskesmasmrebet.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmasmrebet.purbalinggakab.go.id/</a>
16	Puskesmas Bobotsari	<a href="https://puskesmasbobotsari.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmasbobotsari.purbalinggakab.go.id/</a>
17	Puskesmas Karangreja	<a href="https://puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id/</a>
18	Puskesmas Karangjambu	<a href="https://puskesmaskarangjambu.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskarangjambu.purbalinggakab.go.id/</a>
19	Puskesmas Karanganyar	<a href="https://puskesmaskaranganyar.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskaranganyar.purbalinggakab.go.id/</a>

20	Puskesmas Karangtengah	<a href="https://puskesmaskarangtengah.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmaskarangtengah.purbalinggakab.go.id/</a>
21	Puskesmas Karangmoncol	<a href="https://puskesmaskarangmoncol.purbalinggakab.go.id">https://puskesmaskarangmoncol.purbalinggakab.go.id</a>
22	Puskesmas Rembang	<a href="https://puskesmasrembang.purbalinggakab.go.id/">https://puskesmasrembang.purbalinggakab.go.id/</a>

**Tabel 18. Daftar Email Puskesmas Kabupaten Purbalingga**

NO	PUSKESMAS	EMAIL
1	Puskesmas Kemangkon	puskesmaskemangkon@purbalinggakab.go.id
2	Puskesmas Bukateja	puskesmasbukateja@purbalinggakab.go.id
3	Puskesmas Kutawis	puskesmaskutawis@purbalinggakab.go.id
4	Puskesmas Kejobong	puskesmaskejobong@purbalinggakab.go.id
5	Puskesmas Pengadegan	puskesmaspengadegan@purbalinggakab.go.id
6	Puskesmas Kaligondang	puskesmaskaligondang@purbalinggakab.go.id
7	Puskesmas Kalikajar	puskesmaskalikajar@purbalinggakab.go.id
8	Puskesmas Purbalingga	puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id
9	Puskesmas Bojong	puskesmasbojong@purbalinggakab.go.id
10	Puskesmas Kalimanah	puskesmaskalimanah@purbalinggakab.go.id
11	Puskesmas Padamara	puskesmaspadamara@purbalinggakab.go.id
12	Puskesmas Kutasari	puskesmaskutasari@purbalinggakab.go.id
13	Puskesmas Bojongsari	puskesmasbojongsari@purbalinggakab.go.id
14	Puskesmas Serayu Larangan	puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id
15	Puskesmas Mrebet	puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id
16	Puskesmas Bobotsari	puskesmasbobotsari@purbalinggakab.go.id
17	Puskesmas Karangreja	puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id
18	Puskesmas Karangjambu	puskesmaskarangjambu@purbalinggakab.go.id
19	Puskesmas Karanganyar	puskesmaskaranganyar@purbalinggakab.go.id

20	Puskesmas Karangtengah	puskesmaskarangtengah@purbalinggakab.go.id
21	Puskesmas Karangmoncol	puskesmaskarangmoncol@purbalinggakab.go.id
22	Puskesmas Rembang	puskesmasrembang@purbalinggakab.go.id

## **BAB VI**

### **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode Tahun 2021-2026. Agar dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, sebagai upaya dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi. Selain untuk menjawab permasalahan daerah, perumusan tujuan dan saran pembangunan juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

#### **A. VISI**

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember Tahun 2020 dan terlantik pada tanggal 26 Februari Tahun 2021. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU  
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

- b. **Purbalingga yang Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.
- c. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.
- d. Maksud dari **Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

## **B. MISI**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih tersebut adalah:

- 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;**
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah /Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

### C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Agar Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 meliputi 7 (tujuh) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. **Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis**, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

**Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.**

- b. **Misi 2:** Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. **Misi 3 :** Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
- d. **Misi 4 :** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya

melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

- e. **Misi ke-5** : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. **Misi ke-6** : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. **Misi ke-7** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Misi ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Implementasi misi ini diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas wilayah serta daya dukung lingkungan dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.
2. Optimalnya Pemanfaatan Ruang.
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

**Tabel 16. Sasaran dan Tujuan Kabupaten Purbalingga**

Misi	Tujuan	Sasaran
<p><b>Misi 1 :</b> Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah</p>
<p><b>Misi 2 :</b> Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran</p>	<p>Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum</p>
<p><b>Misi 3:</b> Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak</p>	<p>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>
		<p>Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>
<p><b>Misi 4 :</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia dan Kesetaraan Gender</p>	<p>Meningkatnya kualitas pendidikan</p>
		<p>Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat</p>
		<p>Meningkatnya keberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak</p>
<p><b>Misi 5 :</b> Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa,</p>	<p>Meningkatnya daya saing ekonomi daerah</p>	<p>Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah</p>
		<p>Meningkatnya kesempatan kerja</p>

pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja		dan berusaha
<b>Misi 6 :</b> Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa	Meningkatnya status kemandirian desa
<b>Misi 7 :</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur
		Optimalnya pemanfaatan ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga termasuk dalam salah satu program prioritas Bupati - Wakil Bupati Purbalingga terpilih Tahun 2021 - 2026 yaitu program peningkatan *e-Government*. sebagai salah satu upaya pencapaian visi yang ditetapkan pada misi ke satu yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih, Akuntabel dan Demokratis, sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat, dengan tujuan jangka menengah yang akan dicapai yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

## BAB VII TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN PURBALINGGA

### A. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga berperan sebagai “IT” nya Kabupaten Purbalingga. Peran yang bisa diambil oleh Dinkominfo adalah sebagai *support* dan *enabler*. *Support* berarti memberi bantuan dan *handling* jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan *enabler* berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga selaras dengan rencana strategis **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga tahun 2021, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2022 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai **2,23 (Cukup)** menjadi **3,34 (Baik)**.

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat di tabel 17 berikut.

***Tabel 17. Target Pengembangan Indeks SPBE***

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2021	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2026	Uraian Target
Domain Kebijakan SPBE	1,90	3,00	
Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2021	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2026	Uraian Target

<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>1,90</b>	<b>3,00</b>	
Perencanaan Strategis SPBE	1,50	3,00	Penyusunan Arsitektur SPBE, Penyusunan Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Penyusunan Inovasi Proses Bisnis
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	3,00	Adanya Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
Penyelenggara SPBE	2,50	3,00	Penyusunan Rencana Aksi Tim Koordinasi SPBE dan Pembentukan Tim Kolaborasi SPBE
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>1,18</b>	<b>3,00</b>	
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	3,00	Menyusun manajemen resiko SPBE, Manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.
Audit TIK	1,07	3,00→1	Melakukan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, audit keamanan SPBE.
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>2,89</b>	<b>3,75</b>	

Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	2,60	3,50	Melakukan monitoring evaluasi dan pengembangan layanan SPBE
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	4,00	Melakukan monitoring evaluasi dan pengembangan layanan SPBE
<b>INDEK SPBE</b>	<b>2,23</b>	<b>3,34</b>	<b>Baik</b>

## B. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga dapat dilihat di gambar

1. yang terdiri dari 4 domain , yaitu:

- Kebijakan SPBE;
- Tata Kelola SPBE;
- Manajemen SPBE;
- Layanan SPBE.



*Gambar 1. Inisiatif Strategis*



## **B.1. Kebijakan SPBE**

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori kebijakan SPBE terdiri dari :

1. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan yang mengatur tentang arsitektur, peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, kebijakan keamanan informasi. Pembuatan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang SPBE akan menguatkan secara regulasi dan legitimasi program, kepastian anggaran dan payung hukum yang berdampak pada program yang berkelanjutan.

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi :

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Purbalingga.
  - b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
  - c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah.
  - d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Purbalingga dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.
  - e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
    - a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
    - b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, serta melakukan koordinasi dengan Tim

Koordinasi SPBE Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;

- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding;
- d. Menyusun Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE.

## **B.2. Tata Kelola SPBE**

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari :

### **B.2.1. Perencanaan strategis SPBE**

#### **1. Penyusunan Arsitektur SPBE,**

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas :

- a. Arsitektur Proses Bisnis
- b. Arsitektur Layanan
- c. Arsitektur Data
- d. Arsitektur Aplikasi
- e. Arsitektur Infrastruktur
- f. Arsitektur Keamanan

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD.

Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD.

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk

mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga.

## 2. Penyusunan Peta Rencana SPBE

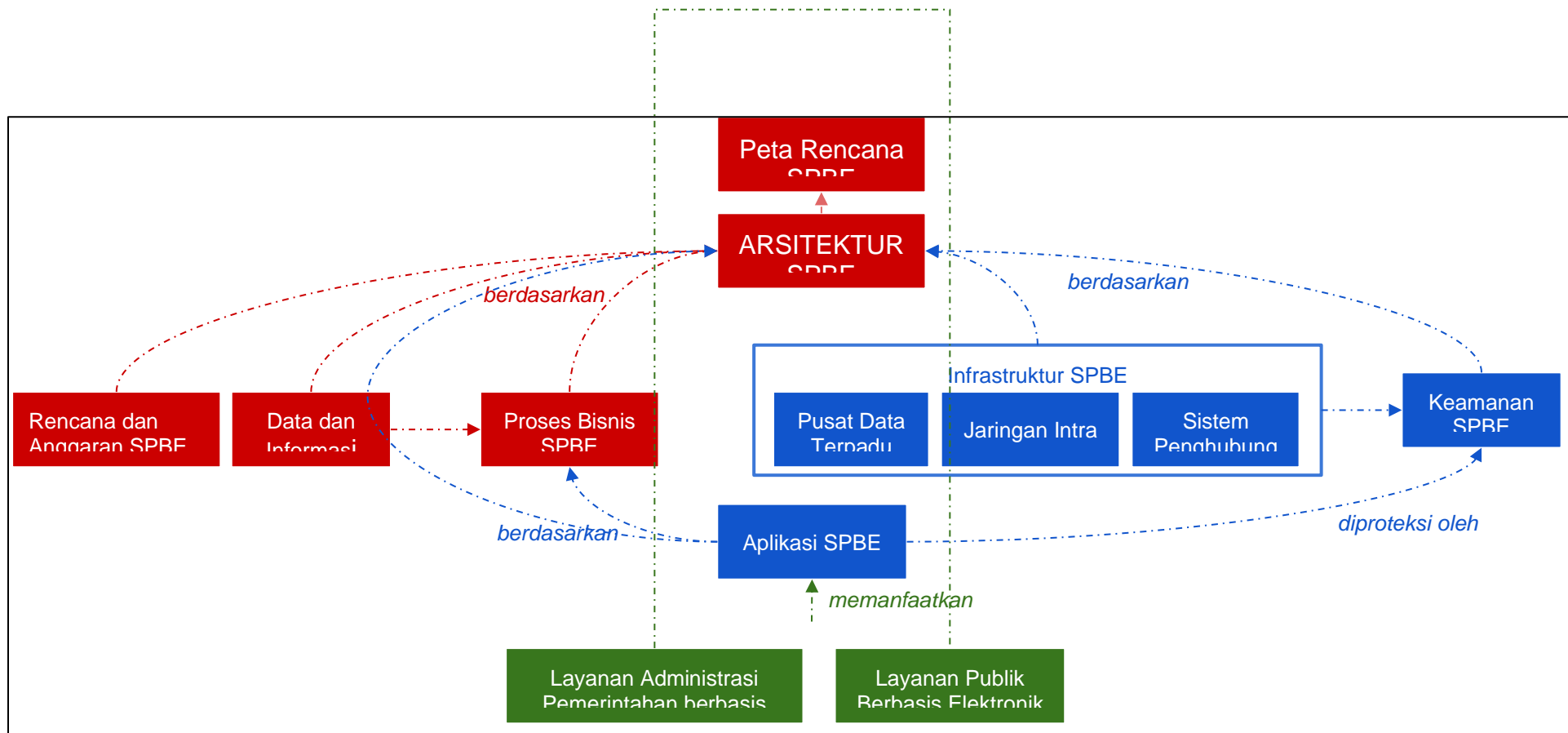
Berdasarkan analisis kesenjangan SPBE Kabupaten Purbalingga, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

## 3. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

Menganalisa bahwa SPBE adalah sebuah sistem yang saling terkait, sehingga kekurangan yang belum dipenuhi dapat dilihat prioritas dan perannya. Berikut adalah keterpaduan unsur SPBE.

Keterpaduan tersebut dimulai dari :

1. Diawali dengan penyediaan layanan terpadu baik administrasi pemerintahan atau publik, yang semuanya berbasis elektronik
2. Sebuah layanan, dapat berjalan secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi
3. Aplikasi dibuat berdasarkan proses bisnis yang telah terdefinisi
4. Aplikasi diproteksi oleh keamanan SPBE
5. Aplikasi dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
6. Infrastruktur dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
7. Infrastruktur diproteksi oleh keamanan SPBE
8. Data dan Informasi dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
9. Data dan Informasi mendukung berjalannya proses bisnis
10. Keamanan SPBE dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
11. Rencana dan Anggaran dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
12. Arsitektur SPBE dibuat atas arah dan kebijakan yang tertera dalam Peta Rencana SPBE
13. Peta Rencana SPBE daerah dibuat selaras dengan RPJMD dan Peta Rencana SPBE Nasional



Gambar Keterpaduan Unsur SPBE

Yang menjadi faktor kunci bagi Kabupaten Purbalingga adalah ketersediaan Arsitektur SPBE Purbalingga, yang akan menjadi sentral penerapan SPBE dan dengan ketersediaan anggaran SPBE.

1. Penyusunan Inovasi Proses Bisnis/Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Penyusunan tata kelola (SOP, Petunjuk Teknis) tentang Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

#### **B.2.2. Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Kematangan pembangunan aplikasi  
Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
  - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
  - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
2. Kematangan Layanan Pusat Data
  - a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Purbalingga;
  - b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data

dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Purbalingga;

- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinkominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

### 3. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah.
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- c. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang menghubungkan jaringan di dalam pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).

### 4. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat

menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;

- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

### **B.2.3. Penyelenggara SPBE**

1. Penyusunan Rencana Aksi Tim Koordinasi SPBE dan Pembentukan Tim Kolaborasi SPBE.
2. Pembentukan Tim kolaborasi SPBE.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah.
4. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
5. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain :
  - a. penyampaian ide/ gagasan SPBE;
  - b. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
  - c. peningkatan kompetensi teknis;
  - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
  - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
  - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
6. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

## **C. Manajemen SPBE**

### **C.1. Penerapan Manajemen SPBE**

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional

Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui :

- 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
  - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
  - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
  - 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
  - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- f. Manajemen Pengetahuan  
Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- g. Manajemen Perubahan  
Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

**C.2. Audit TIK, meliputi :**

1. Audit Infrastruktur SPBE

Lingkup dari audit infrastruktur SPBE adalah tata kelola dan fungsionalitas kinerja infrastruktur yang dikelompokkan menjadi pusat data, jaringan intra pemerintahan, dan sistem pengembangan layanan.

2. Audit Aplikasi SPBE

Audit aplikasi mencakup aplikasi umum dan aplikasi khusus SPBE. Aplikasi umum adalah aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan /atau dalam daerah. Aplikasi umum ditentukan KemenPAN RB. Sedangkan aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, digunakan, dikembangkan dan dikelola oleh instansi pusat atau daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat/ instansi pemerintah dalam daerah. Lingkup dari audit aplikasi adalah tata kelola, manajemen, dan fungsionalitas kinerja aplikasi.

### 3. Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan instrumen yang disusun oleh BSSN. Peraturan tersebut memuat standar dan tata cara dalam melaksanakan Audit Keamanan SPBE, sedangkan instrumen memuat kriteria keamanan minimal yang perlu dilakukan audit. Peraturan dan instrumen dapat diakses pada <https://bssn.go.id/audit-keamanan-spbe>. Hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan audit keamanan SPBE adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan / kompetensi tentang instrumen, standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE. Instansi diharapkan sudah menerapkan Manajemen Keamanan, bisa melalui SMPI ataupun SMKI, atau Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### **D. Layanan SPBE**

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari :

1. Survey Pengguna SPBE
  - a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
  - b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
  - c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Purbalingga.
2. Portal Layanan Publik Terintegrasi
  - a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna

- mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga
  - c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
  - d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE;
  - f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
  - g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan

administrasi pemerintahan;

- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian Data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal- kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
- e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

#### 4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses :
  - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;

- 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
  - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

#### 5. Pembangunan Portal Data Daerah

- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
- c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

#### 6. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
- b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak

terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;

- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan *big data* diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

## BAB VIII ANALISIS KESENJANGAN

### 8.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (*Standar Operational Procedure*) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 1 jenis aspek kebijakan, yaitu :

#### **Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**

*Tabel 18. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan*

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	Ada, belum menyeluruh dan belum dilaksanakan	Ada, menyeluruh dan dilaksanakan	Perlu Dibuat / dilengkapi dan disosialisasikan

### 8.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, *stakeholder*, perencanaan dan *enabler* (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau *enabler* berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan. Domain tata kelola terdiri dari 3 aspek yaitu :

1. Perencanaan strategis SPBE
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
3. Penyelenggara SPBE

**Tabel 19. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola**

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Perencanaan strategis	Belum memiliki Peta Rencana, Arsitektur SPBE, Keterpaduan perencanaan dan penganggaran serta inovasi proses bisnis	Ada , disahkan & disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Memiliki, baru sebagian kecil	Ada, Menyeluruh	Perlu dibangun, dikembangkan, dan dikelola
3	Penyelenggaraan SPBE	Tim pengarah belum memiliki program kerja Belum ada Tim kolaborasi SPBE	Ada dengan program kerja terencana	Perlu disusun program kerja tim pengarah SPBE & Dibentuk tim kolaborasi

### 8.3. Domain Manajemen

**Tabel 20. Analisa Kesenjangan Domain Manajemen**

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum memiliki Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data , Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Ada , disahkan & disosialisasikan,	Perlu dibuat dan disosialisasikan
2	Audit TIK	Belum menjalankan Audit TIK terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE,	Ada, disahkan	Perlu dilaksanakan secara terencana

#### 8.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan *output* dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

**Tabel 21. Analisis Kesenjangan Domain Layanan**

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan <i>single entry</i>	Layanan Terintegrasi dalam suatu portal	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan <i>single entry</i>	Layanan Terintegrasi dalam suatu portal	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

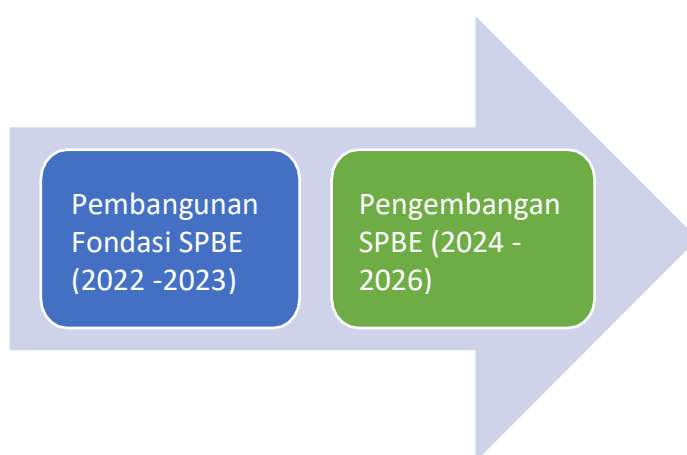
## **BAB IX**

### **PETA RENCANA SPBE**

### **KABUPATEN PURBALINGGA**

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE Tahun 2022 – 2023; dan
- Tahapan pengembangan SPBE Tahun 2024 – 2026.



***Gambar 2. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE***

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2022 - 2023 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Bupati tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK (*Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi*) penyelenggara SPBE;
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;

7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE;
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD);
10. Sistem Keamanan Informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan Tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah :

1. Penguatan portal Layanan SPBE dan Pengembangan portal layanan SPBE berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan inisiatif strategis pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2026 dapat dilihat di tabel 15.

### 9.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga (2022 – 2026)

**Tabel 22. Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga (2022 – 2026)**

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
<b>1</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>								
<b>1.1</b>	Penguatan Kebijakan SPBE	1.1.1	Reviu Perbup nomor 56 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	✓				
		1.1.2	Perbup Penyelenggaraan SPBE	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	✓				
		1.1.3	Perbup Peta Rencana SPBE	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	✓				
		1.1.4	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	✓				
<b>1.2</b>	Menyusun Peta Rencana SPBE	1.2.1	Dokumen Peta Rencana SPBE	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bapelitbangda, Bagian Hukum	✓				
		1.2.2	Evaluasi dan optimalisasi penerapan peta rencana SPBE	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bapelitbangda, Bagian Hukum		✓	✓	✓	✓
<b>1.3</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga	1.3.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Purbalingga	Bagian Organisasi dan Dinkominfo	✓	✓			
		1.3.2	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Purbalingga	Bagian Organisasi dan Dinkominfo	✓	✓			

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
		1.3.3	Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Purbalingga	Bappelitbangda dan Dinkominfo	✓	✓			
		1.3.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Purbalingga	Dinkominfo dan OPD terkait	✓	✓			
		1.3.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Purbalingga	Dinkominfo	✓	✓			
		1.3.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga	Dinkominfo	✓	✓			
1.4	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1.4.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran TIK	Bappelitbangda, Bakeuda, Dinkominfo, dan Bagian Hukum	✓	✓			
		1.4.2	Keputusan Bupati ttg konsultasi rencana anggaran SPBE (kebijakan tentang konsultasi rencana anggaran SPBE OPD kepada OPD Pengelola TIK / Dinkominfo)	Bappelitbangda, Bakeuda, Dinkominfo, dan Bagian Hukum	✓	✓			
1.5	Inovasi Proses Bisnis SPBE	1.5.1	Dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE	Bagian Organisasi	✓	✓			
1.6	Penguatan Penyelenggara SPBE	1.6.1	Menyusun rencana program kerja tim koordinasi SPBE yang dikoordinasikan dan	Tim Koordinasi SPBE	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
			dikomunikasikan kepada seluruh OPD						
		1.6.2	Membentuk tim kolaborasi SPBE yang melibatkan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga penelitian, pelaku usaha dan masyarakat	Tim Koordinasi SPBE	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2</b>	<b>Manajemen SPBE</b>								
<b>2.1</b>	Menyusun manajemen risiko SPBE	2.1.1	Dokumen manajemen risiko SPBE	Bagian Organisasi, Dinkominfo	✓	✓			
		2.1.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Bagian Organisasi, Dinkominfo			✓	✓	✓
<b>2.2</b>	Menyusun pedoman manajemen data	2.2.1	Penyusunan pedoman manajemen data	Bappelitbangdan, Dinkominfo, BPS	✓	✓			
		2.2.2	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	Bappelitbangdan, Dinkominfo, BPS, dan Bagian Hukum			✓	✓	✓
		2.2.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Bappelitbangdan, Dinkominfo, BPS	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2.3</b>	Menyusun Pedoman Manajemen Aset TIK	2.3.1	Penyusunan pedoman manajemen Aset TIK	Bakeuda, Dinkominfo, dan Bagian Hukum	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
		2.3.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Bakeuda, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		2.3.3	Menyusun pedoman yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan / penggunaan, dan penghapusan aset TIK	Bappelitbangda, Bakeuda, Dinkominfo	✓				
		2.3.4	Menyusun program dan kegiatan Manajemen Aset TIK	Bakeuda, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		2.3.5	Audit TIK Kabupaten Purbalingga	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
2.4	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE	2.4.1	Adanya Standar Kompetensi SDM Teknis Penyelenggara SPBE	Dinkominfo dan BKPPD	✓	✓	✓	✓	✓
		2.4.2	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)	BKPPD dan Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		2.4.3	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	BKPPD dan Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
2.5	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen	2.5.1	Mensosialisasikan aplikasi manajemen pengetahuan kepada seluruh OPD.	BKPPD dan Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
	Pengetahuan	2.5.2	Reviu dan evaluasi terhadap aplikasi manajemen pengetahuan	BKPPD dan Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
2.6	Manajemen Perubahan	2.6.1	Penyusunan Manajemen Perubahan	Bagian Organisasi	✓	✓			
		2.6.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Bagian Organisasi Dilaksanakan oleh seluruh OPD			✓	✓	✓
2.7	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	2.7.1	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan, petunjuk penggunaan layanan SPBE, )	Bagian Organisasi dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓	✓
		2.7.2	Adanya portal pusat layanan service desk terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan	Dinkominfo dan OPD Terkait	✓	✓			

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
				2,6	2,8	3	3,2	3,34
		pengembangan aplikasi baru						
2.7.3		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD	Bagian Organisasi, Dinkominfo dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
2.7.4		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Dinkominfo dan Bagian Hukum		✓	✓	✓	✓
2.7.5		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	Dinkominfo dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
2.7.6		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
2.7.7		Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	Bagian Organisasi, Dinkominfo, dan Bagian Hukum		✓			
2.7.8		Evaluasi dan optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
2.7.10		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Keuangan Daerah	Bakeuda dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2022	2023	2024	2025	2026	
				2,6	2,8	3	3,2	3,34	
		2.7.11	Penyusunan Kebijakan tentang layanan Manajemen kinerja	BKPPD, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	✓	✓			
		2.7.12	Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum			✓	✓	✓
		2.7.13	Evaluasi Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja	BKPPD, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum			✓	✓	✓
		2.7.14	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan	Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinkominfo, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
		2.7.15	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik	Inspektorat, Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
		2.7.16	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
		2.7.17	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	Inspektorat, Dinkominfo, dan Bagian Hukum					

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
			<i>Pembuatan Sistem Layanan Pengajuan Surat Keterangan Bebas Temuan secara online berbasis WEB Bagi ASN yang akan mengajukan mutasi ke Pemda lain.</i>		✓	✓	✓	✓	✓
		2.7.18	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
		2.7.19	Menyusun Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓			
		2.7.20	Evaluasi dan optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum			✓	✓	✓
<b>3</b>	<b>Layanan SPBE</b>								
<b>3.1</b>	Melakukan reviu dan evaluasi terhadap Manajemen Layanan SPBE	3.1.1	Survey Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna SPBE	Dinkominfo dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓	✓
<b>3.2</b>	Membuat kebijakan tentang penggunaan layanan kominfo	3.2.1	Keputusan Kepala Dinkominfo tentang penggunaan layanan kominfo	Dinkominfo	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
3.3	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	3.3.1	Adanya pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik Kabupaten Purbalingga	Bagian Organisasi, Dinkominfo dan OPD terkait			✓	✓	
		3.3.2	Adanya portal pelayanan publik Kabupaten Purbalingga	Dinkominfo dan OPD terkait		✓	✓		
3.4	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan pengaduan pelayanan publik	3.4.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan pengaduan pelayanan publik ( <a href="https://maturbup.purbalinggakab.go.id/">https://maturbup.purbalinggakab.go.id/</a> )	Bagian Organisasi, Dinkominfo, Bagian Humas	✓	✓	✓	✓	✓
3.5	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik	3.5.1	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik (Satu Data Purbalingga)	Bappelitbangda, Dinkominfo, BPS	✓	✓	✓	✓	✓
3.6	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik	3.6.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik ( <a href="https://jdih.purbalinggakab.go.id/">https://jdih.purbalinggakab.go.id/</a> )	Bagian Hukum, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
3.7	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektor Kesehatan	3.7.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektor Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho	✓	✓	✓	✓	✓
		3.7.2	Migrasi domain untuk aplikasi Admin PSC 119 ke Domain	Dinas Kesehatan, Dinkominfo	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
			Pemerintahan						
		3.7.3	Pengembangan layanan kesehatan lain IRT(Perizinan PIRT)	Dinas Kesehatan, Dinkominfo		✓			
3.8	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektor Perizinan	3.8.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektor Perizinan ( <a href="https://sicantikui.layanan.go.id/">https://sicantikui.layanan.go.id/</a> )	DPMPTSP, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
3.9	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektoral administrasi kependudukan Berbasis Elektronik	3.9.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektoral administrasi kependudukan Berbasis Elektronik	DINPENDUKCAPIL	✓				
		3.9.2	Aplikasi pelayanan Dukcapil			✓			
		3.9.3	KTP Digital dari dirjen dukcapil			✓			
		3.9.4	Implementasi SIAK Terpusat Review Implementasi SIAK		✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
			Terpusat		✓				
		3.9.5	Implementasi Adminduk Dalam Genggaman (aplikasi pusat dari dirjen dukcapil) Review Implementasi Adminduk Dalam Genggaman		✓				
3.10	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Pendidikan	3.10.1	Pendataan layanan sektor pendidikan berbasis elektronik	Dindikbud, Dinkominfo	✓				
		3.10.2	Survey kebutuhan layanan pendidikan berbasis elektronik	Dindikbud, Dinkominfo	✓				
		3.10.3	Reviu dan pengembangan layanan pendidikan berbasis elektronik	Dindikbud, Dinkominfo		✓	✓	✓	✓
3.11	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan	3.11.1	Pendataan layanan Berbasis Elektronik Sektor Kesejahteraan Sosial	Dinsosdaldukkbp3a, Dinkominfo	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
	Berbasis Elektronik Sektor Kesejahteraan Sosial	3.11.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kesejahteraan Sosial	Dinsosdaldukkbp3a, Dinkominfo	✓				
		3.11.3	Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kesejahteraan Sosial	Dinsosdaldukkbp3a, Dinkominfo		✓	✓	✓	✓
		3.12	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor UMKM						
		3.12.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor UMKM antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- CS Online berbasis WA</li> <li>- Buku tamu digital di semua bidang DINKOPUKM</li> <li>- Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT)</li> <li>- Rumah Online UMKM berbasis grup WA</li> </ul>	Dinkop UKM, Dinkominfo	✓				
		3.12.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor UMKM dengan cara melakukan pemantauan keefektifan penggunaan pendataan berbasis	Dinkop UKM, Dinkominfo	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
			elektronik						
		3.12.3	Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik sektor UMKM	Dinkop UKM, Dinkominfo		✓	✓	✓	✓
3.13	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kebencanaan	3.13.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kebencanaan (EWS)	BPBD, Dinkominfo	✓				
		3.13.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kebencanaan	BPBD, Dinkominfo	✓				
		3.13.3	Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kebencanaan	BPBD, Dinkominfo		✓			
3.14	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor	3.14.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Ketenagakerjaan ( <a href="https://bursakerja.jatengprov.go.id/">https://bursakerja.jatengprov.go.id/</a> WA Blash untuk penyampaian informasi	Dinnaker, Dinkominfo	✓				

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
	Ketenagakerjaan		lowongan kerja kepada Canaker menggunakan nomor yang terdaftar pada e makaryo)						
3.14.2		Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Ketenagakerjaan	Dinnaker, Dinkominfo	✓					
3.14.3		Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Ketenagakerjaan	Dinnaker, Dinkominfo		✓	✓	✓	✓	
3.15	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Infrastruktur / Pekerjaan Umum	3.15.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Infrastruktur / Pekerjaan Umum	DPU-PR, Dinkominfo	✓				
		3.15.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Infrastruktur / Pekerjaan Umum	DPU-PR, Dinkominfo	✓				
		3.15.3	Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Infrastruktur / Pekerjaan Umum	DPU-PR, Dinkominfo		✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
		3.15.4	Pembuatan aplikasi sistem monitoring pembangunan infrastruktur	DPU-PR, Dinkominfo			✓		
3.16	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perumahan / Permukiman	3.16.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perumahan / Permukiman	Dinrumkim, Dinkominfo	✓				
		3.16.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perumahan / Permukiman	Dinrumkim, Dinkominfo	✓				
		3.16.3	Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik sektor Perumahan / Permukiman	Dinrumkim, Dinkominfo		✓	✓	✓	✓
3.17	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Pariwisata	3.17.1	Pembuatan aplikasi android untuk info wisata	Dinporapar, Dinkominfo	✓	✓			
3.18	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Transportasi	3.18.1	Pengembangan Aplikasi LPJU menjadi aplikasi Online	Dinhub, Dinkominfo		✓			

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
3.19	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perdagangan	3.19.1	Pembuatan aplikasi e Retribusi Pasar Bukateja	Dinperindag, Dinkominfo		✓			
		3.19.2	Pembuatan aplikasi Surat Ijin Menempati Kios Pasar	Dinperindag, Dinkominfo		✓			
<b>4</b>	<b>Aplikasi</b>								
4.1	Pembangunan Aplikasi	4.1.1	Melaksanakan reviu dan evaluasi aplikasi secara periodik	Dinkominfo dengan OPD terkait	✓	✓	✓	✓	✓
		4.1.2	Melaksanakan konsultasi pembangunan aplikasi dengan OPD pengampu TIK	Dinkominfo dengan OPD terkait	✓	✓	✓	✓	✓
		4.1.3	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinkominfo, OPD Terkait, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
4.2	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	4.2.1	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinkominfo dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓	✓
4.3	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pak	4.3.1	Tersedianya layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Purbalingga	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
4.4	Pembangunan Portal Data Daerah	4.4.1	Adanya pengembangan portal data Kabupaten Purbalingga	Dinkominfo dan Bappelitbangda		✓	✓		

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
4.5	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	4.5.1	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Bappelitbangda, Dinkominfo, dan OPD terkait				✓	✓
		4.5.2	Adanya penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Bappelitbangda, Dinkominfo, dan OPD terkait					✓
4.6	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	4.6.1	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Bappeda, Bakeuda, Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6.2	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6.3	Adanya pengembangan integrasi Kearsipan (e-dokumen persuratan)	Dinarpus dan Dinkominfo		✓	✓		
		4.6.4	Melakukan reviu dan evaluasi aplikasi kearsipan Dinamis (SIMANIS)	Dinarpus dan Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6.5	Penggunaan Aplikasi Srikandi dengan tahap pembuatan template surat sesuai tata naskah Dinas & kode klasifikasi	Dinarpus dan Dinkominfo					

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
				2,6	2,8	3	3,2	3,34
		surat, tata naskah dinas mendasari perbup, pola kearsipan, klasifikasi arsip, tanda tangan elektronik, yang direncanakan digunakan bulan Juni 2022, dengan tahapan bulan maret menyusun template tata naskah dinas, bulan April dan Mei Melaksanakan pendampingan OPD untuk input instrumen berupa kode klasifikasi surat. Selanjutnya di bulan juni melaksanakan pengajuan permohonan akun ke ANRI, dan dilaksanakan penetapan penerapan aplikasi Srikandi.		✓	✓	✓	✓	✓
4.6.6	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓	
4.6.7	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓	
4.6.8	Reviu dan evaluasi Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik	Bappelitbangda, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓	

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
				2022	2023	2024	2025	2026	
				2,6	2,8	3	3,2	3,34	
		4.6.9	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik (SIMDA)	Bakeuda, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6.10	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, sesuai dengan kebijakan terbaru (SIMDA)	Bakeuda, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6.11	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik	BLP, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6.12	Melakukan reviu, evaluasi, dan pengembangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik ( <a href="https://e-kepegawaian.purbalinggakab.go.id/">https://e-kepegawaian.purbalinggakab.go.id/</a> )	BKPPD, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6.13	Mengembangkan layanan transaksi kepada pengguna aplikasi kepegawaian untuk pembuatan karis, karsu, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, izin belajar, izin penggunaan gelar, pengajuan cuti, pensiun dan presensi secara elektronik	BKPPD, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
				2,6	2,8	3	3,2	3,34
4.6.14	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik (SIMDA ASET)	Bakeuda, Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓	
4.6.15	Pengembangn aplikasi destop sim aset purbalingga 90.220.07.1 dan 108.1.20.07.5 menjadi aplikasi web	Bakeuda, Dinkominfo		✓	✓			
4.6.16	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik	Inspektorat, Dinkominfo		✓	✓			
4.6.17	Melakukan pengembangan fitur transaksi pada Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik	Inspektorat, Dinkominfo			✓			
4.6.18	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi, Dinkominfo	✓	✓				
4.6.19	Mengembangkan fitur transaksi, kolaborasi dan integrasi pada Layanan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi, Dinkominfo			✓			
4.6.20	Membuat aplikasi layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang	BKPPD, Dinkominfo						

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
				2,6	2,8	3	3,2	3,34
		terkolaborasi dan terintegrasi dengan layanan kepegawaian lainnya. (e Kinerja)		✓				
		4.6.21 Mengembangkan aplikasi layanan kinerja untuk perhitungan tukin	BKPPD, Dinkominfo		✓			
		4.6.22 Pengembangan integrasi e-kepegawaian dengan SAPK BKN	BKPPD, Dinkominfo		✓	✓		
<b>5</b>	<b>Infrastruktur TIK</b>							
5.1	Pengembangan Pusat Data Terpadu	5.1.1 Dokumen DED pusat data terpadu	Dinkominfo	✓				
		5.1.2 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data	Dinkominfo dan Bagian Hukum	✓	✓			
		5.1.3 Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional <i>data center</i>	Dinkominfo, Bappelitbangda, Bakeuda		✓	✓		
5.2	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.2.1 Adanya pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dan kelurahan	Dinkominfo, Bappelitbangda, Bakeuda	✓	✓	✓	✓	✓
		5.2.2 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian	Dinkominfo, OPD Terkait, Bagian					

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
			Jaringan Intra instansi Pemerintah Daerah	Hukum	✓	✓	✓	✓	✓
5.3	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE	5.3.1	Tersedianya <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
<b>6</b>	<b>Keamanan</b>								
6.1	Menyusun Kebijakan internal terkait manajemen keamanan Informasi	6.1.1	Perbup Manajemen Keamanan Informasi	Dinkominfo, Bagian Hukum		✓			
		6.1.2	Menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Strategi Pengendalian Keamanan Informasi	Dinkominfo, Bagian Hukum		✓			
		6.1.3	Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian keamanan informasi	Dinkominfo, BSSN, Kemenkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		6.1.4	Menyusun Pedoman Audit Keamanan SPBE.	Dinkominfo	✓				
		6.1.5	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi	Dinkominfo, dan Bagian Hukum		✓	✓	✓	✓
		6.1.6	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
			Informasi						
6.2	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	6.2.1	Adanya Manajemen Keamanan Informasi	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		6.2.2	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( <i>non repudiation</i> ) sumber daya terkait data dan informasi	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		6.2.3	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
<b>7</b>	<b>Audit TIK</b>								
7.1	Pelaksanaan Audit TIK	7.1.1	Menyusun kebijakan tentang Audit TIK	Dinkominfo, Bagian Hukum	✓				
		7.1.2	Menyusun program kerja / rencana audit infrastruktur TIK	Dinkominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.1.3	Menyusun Pedoman Audit Aplikasi SPBE.	Dinkominfo, Bagian Hukum		✓			

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					2,6	2,8	3	3,2	3,34
		7.1.4	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	Dinkominfo, dan Bagian Hukum		✓	✓	✓	✓

## BAB X

### DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Purbalingga yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif- inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

#### Program 1.1. Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Dokumen Peta Rencana SPBE
Tahun	2022
Penanggung Jawab	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bapelitbangda, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami kondisi aktual SPBE Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Merencanakan Target Pembangunan SPBE Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Menganalisis dan Memahami kesenjangan berdasarkan kondisi aktual dengan target capaian yang akan dicapai</li> <li>• Menyusun peta rencana SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2026, Menyusun detail rencana strategis implementasi SPBE Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Menyusun Kebijakan sebagai landasan hukum penerapan peta rencana SPBE Kabupaten Purbalingga</li> </ul>

#### Program 1.2. Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Purbalingga

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahun	2022
Penanggung Jawab	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bapelitbangda, Bagian Hukum

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis</li> <li>• Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (<i>Business Process Modeling and Notation</i>)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>
------------------	--

### Program 1.3. Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Purbalingga

Kode Program	1.3
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi dan Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan</li> <li>• Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

### Program 1.4. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Purbalingga

Kode Program	1.4
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Bappelitbangda dan Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Data</li> <li>• Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

**Program 1.5. Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Dinkominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi</li> <li>● Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>● Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>● Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Purbalingga</li> <li>● Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>● Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

**Program 1.6. Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur</li> <li>● Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>● Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>● Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Purbalingga</li> <li>● Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>● Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

**Program 1.7. Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	1.7
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahun	2023 - 2023
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi</li> <li>● Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>● Memahami metode penulisan arsitektur</li> </ul>

	(Prinsip, Matrik dan Diagram) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi</li> <li>● Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>● Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>
--	---

### **Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	2.1
Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahun	2022
Penanggung Jawab	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE</li> <li>● Menentukan Tupoksi Tim</li> <li>● Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE</li> <li>● Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li> </ul>

### **Program 3.1. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	3.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022
Penanggung Jawab	Dinkominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah Tujuan SPBE dan Aparatur yang akan mewujudkan tujuan tersebut</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

### **Program 3.2. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD**

Kode Program	3.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026

Penanggung Jawab	Bagian Organisasi, Dinkominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah tujuan alur kerja terintegrasi, proses apa saja yang akan diintegrasikan, dan stakeholder yang terlibat</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

### **Program 3.3. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE**

Kode Program	3.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan rencana induk SPBE, ruang lingkup rencana induk SPBE serta penanggungjawab dan pelaksana rencana induk SPBE</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

### **Program 3.4. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK**

Kode Program	3.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Bappelitbangda, Bakeuda, Dinkominfo, dan Bagian Hukum

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran TIK, analisis risiko investasi TIK serta penanggung jawab pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
------------------	--

### **Program 3.5. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data**

Kode Program	3.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Dinkominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

### **Program 3.6. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi**

Kode Program	3.6
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo dan Bagian Hukum

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
------------------	---

**Program 3.7. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai**

Kode Program	3.7
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan ruang lingkup aplikasi umum berbagi pakai, tata kelola dan teknologi pendukung, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.8. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik**

Kode Program	3.8
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023
Penanggung Jawab	Dinkominfo, Dinarpus, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan disusun, seperti tujuan penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik, jaminan keamanan dan keabsahan dokumen (<i>Confidentiality, Integrity, dan Availability</i>), tata kelola dan teknologi pendukung serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
------------------	--

### **Program 3.9. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian**

Kode Program	3.9
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem manajemen kepegawaian
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti ruang lingkup sistem manajemen kepegawaian (perencanaan dan pengembangan PNS, administrasi kepegawaian, pengawasan pengendalian, dokumen kepegawaian), tata kelola serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

### **Program 3.10. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Perencanaan dan Penganggaran**

Kode Program	3.10
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang manajemen perencanaan dan penganggaran
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Bappelitbangda, Bakeuda, dan Bagian Hukum

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan manajemen perencanaan dan penganggaran, pokok-pokok penyusunan rencana kerja dan anggaran, tata cara dan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
------------------	---

**Program 3.11. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah**

Kode Program	3.11
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Bakeuda dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan sistem manajemen keuangan daerah, pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, ruang lingkup pendapatan daerah, ruang lingkup belanja daerah, tata cara penyusunan rancangan anggaran, serta tata cara pelaporan dan evaluasi</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.12. Penyusunan Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja**

Kode Program	3.12
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan manajemen kinerja
Inisiatif Strategis	Penyusunan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan fungsi layanan manajemen kinerja, ukuran dan indikator kinerja, tata cara dan tahapan manajemen kinerja, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
------------------	--

**Program 3.13. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan**

Kode Program	3.13
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengadaan
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinkominfo, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi, ruang lingkup layanan, tata kerja dan standar pelayanan pengadaan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.14. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik**

Kode Program	3.14
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Inspektorat, Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi dan ruang lingkup pengaduan, hak pengadu dan kewajiban pengelola,</li> </ul>

	<p>sarana pengaduan, pengelola layanan, prosedur penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
--	---

**Program 3.15. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Kode Program	3.15
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Bagian Hukum, Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini fungsi, pengelolaan dan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.16. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Whistle Blowing System**

Kode Program	3.16
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan <i>whistle blowing system</i>
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Inspektorat, Dinkominfo, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, ruang lingkup layanan <i>Whistle Blowing System</i>, pengelola dan yang menangani pengaduan, mekanisme pengaduan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
--	---

**Program 3.17. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah**

Kode Program	3.17
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti definisi, asas dan tujuan pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan (pengaduan, Open data, JDIH, Kesehatan, Rumah Sakit, Administrasi Kependudukan, Perizinan, Pariwisata, UMKM, Perdagangan, Kebencanaan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan dan Transportasi, Pangan dan Perikanan, Kesejahteraan Sosial), standar pelayanan, penyelenggara pelayanan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.18. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan Arsitektur SPBE**

Kode Program	3.18
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Dinkominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.19. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data**

Kode Program	3.19
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggung Jawab	Bappelitbangdan, Dinkominfo, BPS, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.20. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE**

Kode Program	3.20
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo, OPD Terkait, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.21. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	3.21
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo, OPD Terkait, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
--	--

**Program 3.22. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi**

Kode Program	3.22
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

**Program 3.23. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK**

Kode Program	3.23
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

#### Program 4.1. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Kode Program	4.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2026
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi, Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE</li><li>• Melakukan asesmen risiko SPBE</li><li>• Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE</li><li>• Menyusun dokumen manajemen risiko SPBE</li><li>• Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi</li><li>• Melakukan evaluasi manajemen risiko</li></ul>

#### Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Kode Program	4.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun arsitektur data</li><li>• Menyusun desain dan model data</li><li>• Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya</li><li>• Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality</i>, <i>integrity</i> dan <i>availability</i> data</li><li>• Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data</li><li>• Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik</li><li>• Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data)</li><li>• Melakukan pengelolaan <i>data warehouse</i> dan <i>data lake</i> yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan</li><li>• Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata</li><li>• Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data</li></ul>

#### Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Kode Program	4.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Bakeuda, Dinkominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyusun perencanaan aset TIK</li> <li>● Melakukan manajemen pengadaan aset TIK</li> <li>● Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK</li> <li>● Melakukan monitoring aset ITK</li> <li>● Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK</li> <li>● Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai</li> <li>● Membuat sistem informasi manajemen aset TIK</li> </ul>
------------------	---

#### **Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan**

Kode Program	4.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	BKPPD dan Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber</li> <li>● Menggunakan dan mengeksplorasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna</li> <li>● Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan</li> <li>● Berbagi pengetahuan dan wawasan</li> <li>● Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi</li> <li>● Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang</li> <li>● Membangun sistem manajemen pengetahuan (Knowledge Management System) dalam bentuk sistem informasi</li> </ul>

#### **Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan**

Kode Program	4.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi Dilaksanakan oleh seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan</li> <li>● Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan</li> <li>● Menyusun perencanaan perubahan</li> <li>● Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan</li> <li>● Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan</li> <li>● Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan</li> <li>● Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus</li> </ul>

#### **Program 4.6. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	4.6
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Purbalingga

Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Tim Koordinasi SPBE
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur dan tata kelola.</li> <li>● Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel)</li> <li>● Melakukan audit</li> <li>● Menganalisa hasil audit</li> <li>● Membuat dokumen audit</li> <li>● Melakukan tindakan koreksi</li> <li>● Pelaksanaan audit TIK secara berkala</li> </ul>

**Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan**

Kode Program	5.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
Inisiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi, dan Dinkominfo, Seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membuat metode survei (elektronik atau manual)</li> <li>● Menentukan kuesioner survei</li> <li>● Mengumpulkan data</li> <li>● Melakukan analisa data hasil survei</li> <li>● Menampilkan hasil survei</li> </ul>

**Program 6.1. Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik (Pengaduan, Open data, JDIH, Kesehatan, Rumah Sakit, Administrasi Kependudukan, Perizinan, Pariwisata, UMKM, Perdagangan, Kebencanaan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan dan Transportasi, Pangan dan Perikanan, Kesejahteraan Sosial dan sektor strategis lainnya) Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>● Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja</li> <li>● Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i></li> <li>● Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik</li> <li>● Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

**Program 6.2. Pembentukan Portal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	6.2
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan publik Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2024
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membentuk integrasi proses bisnis untuk layanan publik, baik secara kluster atau menyeluruh</li> <li>● Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis web service</li> <li>● Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik</li> </ul>

**Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)**

Kode Program	7.1
Nama Program	Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Bappelitbangda, Bakeuda, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>● Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV)</li> <li>● Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses</li> <li>● Menggunakan sistem penghubung</li> <li>● Atau membangun single database untuk seluruh proses</li> <li>● Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan.</li> <li>● Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya</li> <li>● Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

**Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian**

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Dinkominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro</li> <li>● Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada</li> <li>● Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan</li> <li>● Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah</li> <li>● Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian</li> <li>● Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile</li> <li>● Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
------------------	---

### Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Kode Program	7.3
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
Inisiatif Strategis	Portal Kearsipan Terintegrasi
Tahun	2022
Penanggung Jawab	Dinarpus, dan Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menerapkan undang undang arsip nasional</li> <li>● Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>● Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas</li> <li>● Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik</li> <li>● Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian</li> <li>● Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah</li> <li>● Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

### Program 7.4. Pengembangan integrasi Pengaduan Publik

Kode Program	7.4
Nama Program	Pengembangan integrasi Pengaduan Publik
Inisiatif Strategis	Portal Pengaduan Publik Terintegrasi
Tahun	2022-2025
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>● Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi)</li> <li>● Mengintegrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya)</li> <li>● Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai</li> <li>● Melakukan pencatatan (<i>log</i>)</li> <li>● Memonitor waktu respon</li> <li>● <i>Tracking</i> penyelesaian pengaduan</li> <li>● Eskalasi pengaduan dengan kriteria</li> <li>● Evaluasi pengaduan secara berkala</li> <li>● Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

**Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan**

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi</li> <li>• Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu</li> <li>• Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile</li> <li>• Menerapkan SSO (<i>Single Sign On</i>) pada portal yang ada</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat</li> </ul>

**Program 8.1. Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)**

Kode Program	8.1
Nama Program	Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2022
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi)</li> <li>• Membuat SOP disetiap siklusnya dengan RACI (<i>Responsible, Accountable, Consult, Inform</i>) bagi personel yang mengampunya</li> <li>• Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala</li> </ul>

**Program 8.2. Pembentukan portal pusat layanan internal**

Kode Program	8.2
Nama Program	Pembentukan portal pusat layanan internal
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Dinkominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru</li> <li>● Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management ( ITSM )</li> <li>● Membuat SLA layanan</li> <li>● Menerapkan sistem <i>Service Desk</i> dengan prinsip <i>Single Point of Contact</i></li> <li>● Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada</li> <li>● Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA</li> </ul>
------------------	--

### **Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar Tier 1**

Kode Program	9.1
Nama Program	Penyediaan pusat data dengan standar tier 1
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data (Data center tier 1 memiliki peralatan dan komponen IT yang hanya dioperasikan oleh 1 jalur distribusi dan 1 uplink per server)
Tahun	2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan asesmen <i>data center</i> untuk mengukur tingkat kelayakan data center berbasis tier 1</li> <li>● Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen</li> <li>● Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan</li> <li>● Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM</li> </ul>

### **Program 10.1. Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar OPD**

Kode Program	10.1
Nama Program	Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar OPD
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan kajian integrasi infrastruktur daerah, untuk menentukan teknologi yang tepat (FO, Metro, VPN atau Wireless)</li> <li>● Membentuk DED integrasi infrastruktur</li> <li>● Memastikan anggaran implementasi</li> <li>● Implementasi integrasi infrastruktur berbasis kajian dan DED yang ada</li> <li>● Pemeliharaan infrastruktur jaringan</li> <li>● Penyediaan fasilitas backup jaringan</li> <li>● Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan</li> <li>● Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan</li> <li>● Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i></li> </ul>

### Program 11.1. Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah

Kode Program	11.1
Nama Program	Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membentuk sistem <i>data warehouse</i> (Infrastruktur server dan <i>database</i> )</li> <li>● Memastikan kebijakan integrasi dipahami</li> <li>● Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan diintegrasikan</li> <li>● Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil <i>output</i> data dari setiap sistem yang akan dihubungkan.</li> <li>● Meletakkan data yang diambil ke dalam <i>data warehouse</i></li> </ul>

### Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Purbalingga
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Analisa kebutuhan <i>bandwidth</i> per OPD</li> <li>● Melakukan penambahan kapasitas <i>bandwidth</i> jika diperlukan</li> <li>● Melakukan QoS (Quality of Services), untuk mengatur kebutuhan <i>bandwidth</i></li> <li>● Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinkominfo</li> <li>● Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (<i>Network Monitoring System</i>)</li> <li>● Penyediaan fasilitas <i>backup</i> jaringan internet</li> </ul>

### Program 13.1. Penyediaan layanan *Cloud* untuk Kabupaten Purbalingga

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediaan layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membentuk <i>data center</i> yang berbasis virtualisasi</li> <li>● Menetapkan jenis layanan <i>cloud</i> yang akan disediakan (IAAS, PAAS, SAAS)</li> <li>● Memilih teknologi <i>cloud</i> yang akan digunakan</li> <li>● Mensosialisasi adanya <i>cloud</i> lokal</li> <li>● Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server</li> <li>● Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server</li> <li>● Penyediaan fasilitas backup server dengan <i>auto-backup realtime</i> dan <i>co-location</i></li> <li>● Penyediaan File Server dengan NAS (<i>Network Attached Storage</i>) untuk OPD</li> </ul>
------------------	---

#### **Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo dan Bappelitbangda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menentukan sumber data</li> <li>● Menentukan Struktur data</li> <li>● Menentukan metadata</li> <li>● Menerapkan <i>Data Security</i></li> <li>● Membangun Aplikasi Sistem Portal Data</li> <li>● Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Management Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data</li> <li>● Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data</li> <li>● Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD</li> <li>● Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat</li> <li>● Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

#### **Program 15.1. Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi**

Kode Program	15.1
Nama Program	Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI</li> <li>● Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan.</li> <li>● Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi</li> <li>● Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi</li> <li>● Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi</li> <li>● Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi</li> <li>● Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>)</li> <li>● Penyusunan dokumen <i>Cyber Security Incident Response Plan</i></li> <li>● Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas</li> </ul>
------------------	---

**Program 15.2. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya terkait data dan informasi**

Kode Program	15.2
Nama Program	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( <i>non repudiation</i> ) sumber daya terkait data dan informasi
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menerapkan <i>Defense In Depth</i></li> <li>● Menerapkan teknologi perimeter ( Firewall, IDS, IPS )</li> <li>● Menerapkan QoS (<i>Quality of Service</i>) untuk pengaturan <i>bandwidth</i></li> <li>● Menerapkan <i>Update Patch</i> secara regular pada PC dan Server</li> <li>● Menerapkan Enkripsi Data</li> <li>● Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi</li> <li>● Melakukan Pentest secara berkala</li> <li>● Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman</li> <li>● Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang <i>Secure Programming</i></li> <li>● Penerapan sistem SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>)</li> <li>● Penambahan IDS (<i>Intrusion Detection System</i>) / IPS (<i>Intrusion Prevention System</i>)</li> <li>● Penerapan <i>Honeynet</i> dan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>)</li> <li>● Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi</li> </ul>

**Program 15.3. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat**

Kode Program	15.3
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membuat Kebijakan Keamanan Informasi</li> <li>● Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>● Menurunkan kebijakan dalam SOP harian</li> <li>● Monitor dan Evaluasi SOP</li> <li>● Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja</li> <li>● Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi</li> </ul>

**Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga**

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2026
Penanggung Jawab	Bappelitbangda, Dinkominfo, dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data</li> <li>● Menentukan Business Case Pemda untuk di solusi dengan data</li> <li>● Membangun sistem <i>big data</i> infrastruktur dan aplikasi )</li> <li>● Menentukan sumber data pemda ( dokumen, video, database, <i>social media</i>, audio)</li> <li>● Melakukan Ekstraksi Data</li> <li>● Memastikan kualitas data dengan metode <i>cleansing</i> dan <i>filtering</i></li> <li>● Mengintegrasikan data untuk masuk ke dalam sistem big data</li> </ul>

**Program 16.2. Penerapan *Machine Learning* untuk analisa data menuju kecerdasan buatan**

Kode Program	16.2
Nama Program	Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2026
Penanggung Jawab	Bappelitbangda, Dinkominfo, dan OPD terkait

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data dan <i>machine learning</i></li> <li>• Membangun sistem <i>big data</i> secara infrastruktur</li> <li>• Membangun sistem <i>data analytic</i> berbasis <i>machine learning</i>, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan</li> <li>• Menampilkan <i>data analytic</i> dalam sebuah <i>command center</i></li> <li>• Memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan</li> </ul>
------------------	--

### Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	BKPPD, Dinkominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memilih lembaga pelatihan yang kompeten</li> <li>• Menyusun topik materi sosialisasi SPBE</li> <li>• Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan</li> <li>• Melakukan sosialisasi</li> <li>• Melakukan evaluasi</li> </ul>

### Program 18.1. Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE

Kode Program	18.1
Nama Program	Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Dinkominfo dan BKPPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE</li> <li>▪ Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia)</li> <li>▪ Menentukan <i>Job Role</i> dalam penyelenggaraan SPBE</li> <li>▪ Menentukan kompetensi untuk <i>Job Role</i> Penyelenggara SPBE</li> <li>▪ Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE</li> </ul>

### Program 18.2. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Kode Program	18.2
Nama Program	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	BKPPD dan Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menentukan dan menambah jumlah formasi jabatan fungsional</li> <li>▪ Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai</li> </ul>

### Program 18.3. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Lingkup SPBE

Kode Program	18.3
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	BKPPD dan Dinkominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada</li><li>• Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan Magang</li><li>• Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP)</li><li>• Menentukan Pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE</li><li>• Melakukan uji sertifikasi nasional</li></ul>

### Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggung Jawab	Tim Koordinasi SPBE
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha)</li><li>▪ Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu</li><li>▪ Membahas isu isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam <i>output</i> pada layanan publik terpadu dan layanan Administrasi pemerintahan terpadu</li><li>▪ Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li></ul>

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Purbalingga sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Purbalingga, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Purbalingga meliputi tahapan pembangunan pondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Purbalingga meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Kabupaten Purbalingga harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga juga harus terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahunan (RPJMD), sehingga Dokumen Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga yang juga ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

Ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 89

## Daftar Tabel

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2019	15
Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2021	15
Tabel 3. Perbedaan komposisi bobot perhitungan Indeks SPBE dalam Permen PANRB tahun 2018 dengan Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	16
Tabel 4. Perbedaan Indikator indeks SPBE dalam Permen PANRB 8 tahun 2018 dengan Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	16
Tabel 5. Bobot Aspek SPBE sesuai Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	17
Tabel 6. Bobot Indikator Indeks SPBE sesuai Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	18
Tabel 7. Kategori Nilai Indeks SPBE	20
Tabel 8. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	26
Tabel 9. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	30
Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Purbalingga	32
Tabel 11. Manajemen SPBE Purbalingga	33
Tabel 12. Layanan SPBE	35
Tabel 11. Daftar Website OPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga	42
Tabel 12. Daftar Email OPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga	44
Tabel 13. Daftar Website Kecamatan Kabupaten Purbalingga	46
Tabel 14. Daftar Email Kecamatan Kabupaten Purbalingga	47
Tabel 15. Daftar Website Kelurahan Kabupaten Purbalingga	47
Tabel 16. Daftar Website Desa Kabupaten Purbalingga	48
Tabel 17. Daftar Website Puskesmas Kabupaten Purbalingga	52
Tabel 18. Daftar Email Puskesmas Kabupaten Purbalingga	53
Tabel 16. Sasaran dan Tujuan Kabupaten Purbalingga	60
Tabel 17. Target Pengembangan Indeks SPBE	64
Tabel 18. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan	80
Tabel 19. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola	81
Tabel 20. Analisa Kesenjangan Domain Manajemen	81
Tabel 22. Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga (2022 – 2026)	85
Program 1.1. Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga	98
Program 1.2. Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Purbalingga	98
Program 1.3. Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Purbalingga	99
Program 1.4. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Purbalingga	99
Program 1.5. Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Purbalingga	100
Program 1.6. Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Purbalingga	100
Program 1.7. Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga	100
Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga	101
Program 3.1. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim	

Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga	101
Program 3.2. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Alur Kerja Terintegrasi Antar OPD	102
Program 3.3. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	102
Program 3.4. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK	102
Program 3.5. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data	103
Program 3.6. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Integrasi Sistem Aplikasi	103
Program 3.7. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagai Pakai	104
Program 3.8. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	104
Program 3.12. Penyusunan Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja	106
Program 3.13. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan	107
Program 3.14. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik	107
Program 3.15. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	108
Program 3.16. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	108
Program 3.17. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	109
Program 3.18. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan Arsitektur SPBE	109
Program 3.19. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	110
Program 3.20. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE	110
Program 3.21. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga	111
Program 3.22. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi	111
Program 3.23. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	112
Program 4.1. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko	112
Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	113
Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	113
Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	113
Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	114
Program 4.6. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Purbalingga	114
Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan	115
Program 6.1. Pembentukan Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik (Pendidikan, pekerjaan dan usaha, kesehatan, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya) Kabupaten Purbalingga	115
Program 6.2. Pembentukan Portal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga	115
Program 7.1. Pembentukan Integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	116
Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian	116

Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan	116
Program 7.4. Pengembangan Integrasi Pengaduan Publik	117
Program 7.5. Pembentukan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan	117
Program 8.1. Pembentukan Manajemen Layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)	118
Program 8.2. Pembentukan Portal Pusat Layanan Internal	118
Program 9.1. Pengembangan Pusat Data Dengan Standar Internasional Data Center	119
Program 10.1. Membentuk Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD	119
Program 11.1. Membentuk Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	120
Program 12.1. Penyediaan Bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	120
Program 13.1. Penyediaan Layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Purbalingga	121
Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Purbalingga	121
Program 15.1. Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi	121
Program 15.2. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( <i>non repudiation</i> ) sumber daya terkait data dan informasi	122
Program 15.3. Membangun Budaya Keamanan Informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	123
Program 16.1. Penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga	123
Program 16.2. Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk Analisa Data menuju Kecerdasan Buatan	123
Program 17.1. Pelatihan dan Sosialisasi tentang SPBE	124
Program 18.1. Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE	124
Program 18.2. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE	124
Program 18.3. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Lingkup SPBE	125
Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE	125